

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
Jl. Basuki Rahmat No. 1 Lamongan



# LAPORAN PENDAHULUAN

Kerja Sama CSR

IDENTIFIKASI (PENDATAAN)  
**CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY**  
(CSR) KABUPATEN LAMONGAN

2013



## DAFTAR ISI

<b>BAB-1</b>	<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1 - 1</b>
1.1.	Latar Belakang .....	1 - 1
1.2.	Manfaat dari Pelaksanaan CSR.....	1 - 2
1.3.	Dasar Hukum .....	1 - 3
1.4.	Maksud, Tujuan dan Sasaran .....	1 - 3
1.4.1.	Maksud .....	1 - 3
1.4.2.	Tujuan .....	1 - 3
1.4.3.	Sasaran .....	1 - 4
1.5.	Ruang Lingkup .....	1 - 4
1.5.1.	Lingkup Wilayah .....	1 - 4
1.5.2.	Lingkup Kegiatan .....	1 - 4
1.6.	Sistematika Penulisan Laporan .....	1 - 4
<b>BAB-2</b>	<b>KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN GAMBARAN UMUM</b>	
	<b>KABUPATEN LAMONGAN .....</b>	<b>2 - 1</b>
2.1.	Kebijakan Pembangunan .....	2 - 1
2.1.1.	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005 - 2025 .....	2 - 1
2.1.2.	RTRW Kabupaten Lamongan .....	2 - 7
2.2.	Gambaran Umum Kabupaten Lamongan .....	2 - 8
2.2.1.	Kondisi Fisik dan Sumber Daya Alam .....	2 - 8
2.2.1.1.	Letak Geografis dan Administratif .....	2 - 8
2.2.1.2.	Sumberdaya Tanah.....	2 - 8
2.2.2.	Penggunaan Lahan .....	2 - 9
2.2.3.	Sumberdaya Manusia (Kependudukan).....	2 - 10
2.2.3.1.	Jumlah Penduduk .....	2 - 10
2.2.3.2.	Pertambahan dan Pertumbuhan Penduduk .....	2 - 11
2.2.3.3.	Jumlah Penduduk Menurut Agama .....	2 - 11
2.2.4.	Sumberdaya Buatan (sarana dan Prasarana) .....	2 - 12
2.2.4.1.	Sistem Transportasi .....	2 - 12
2.2.4.2.	Jaringan Energi dan Listrik .....	2 - 13
2.2.4.3.	Jaringan Telepon .....	2 - 13
2.2.4.4.	Jaringan Air Bersih .....	2 - 13
2.2.4.5.	Persampahan .....	2 - 14
2.2.4.6.	Sanitasi .....	2 - 14
2.2.4.7.	Fasilitas Pelayanan Umum .....	2 - 14

2.2.5. Ekonomi.....	2 -15
2.2.6. Sumber-Sumber Air dan Irigasi .....	2 -15
<b>BAB 3 LANDASAN TEORI DAN METODOLOGI PENYUSUNAN .....</b>	<b>3 - 1</b>
3.1. Landasan Teori.....	3 - 1
3.1.1. Pengertian dan Tinjauan Teori .....	3 - 1
3.1.2. CSR Bidang Lingkungan .....	3 - 8
3.1.3. CSR Bidang Cipta Karya .....	3 -17
3.2. Metodologi Penyusunan .....	3 -19
<b>BAB-4 RENCANA KERJA DAN JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN.....</b>	<b>4 - 1</b>
4.1. Rencana Kerja .....	4 - 1
4.2. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan .....	4 - 1
4.3. Komposisi Tim dan Penugasan .....	4 - 2
4.4. Jadwal Penugasan Tenaga Ahli .....	4 - 4
<b>BAB-5 PELAPORAN .....</b>	<b>5 - 1</b>



## DAFTAR TABEL, GAMBAR DAN BAGAN

### **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1.	Jenis dan Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Lamongan .....	2 -10
Tabel 2.2.	Jumlah Penduduk Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2008 .....	2 -11
Tabel 2.3.	Jumlah Penduduk Kabupaten Lamongan Berdasarkan Pemeluk Agama .....	2 -11
Tabel 2.4.	Panjang Jalan Menurut Kondisi Perkerasan Jalan.....	2 -12
Tabel 2.5.	Banyaknya Pelanggan Listrik di Kabupaten Lamongan .....	2 -13
Tabel 2.6.	Perkembangan Sarana dan Pemakaian Air Minum Kabupaten Lamongan ..	2 -13
Tabel 2.7.	Banyaknya Sekolah, Guru dan Murid di Kabupaten Lamongan .....	2 -14
Tabel 3.1.	Kegiatan CSR Triple Bottom Line .....	3 - 4
Tabel 4.1.	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Identifikasi CSR di Kabupaten Lamongan .....	4 - 2
Tabel 4.2.	Jadwal Penugasan Tenaga Ahli Penyusunan Identifikasi CSR Di Kabupaten Lamongan .....	4 - 4

### **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1.	Kategori Perusahaan berdasarkan Profit Perusahaan dan Anggaran CSR .....	2 - 2
Gambar 3.2.	Kategori Perusahaan Berdasarkan Tujuan CSR .....	2 - 3

### **DAFTAR DIAGRAM/BAGAN**

Diagram 2.1.	Prosentase penggunaan Lahan di Kabupaten Lamongan .....	2 -10
Diagram 2.2.	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Lamongan dari Tahun 2005-2008 .....	2 -11
Diagram 2.3.	Jumlah Penduduk Menurut Agama yang Dianut Kabupaten Lamongan Tahun 2008 .....	2 -11
Diagram 2.4.	prosentase Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten Lamongan Tahun 2008 ...	2 -12
Bagan 3.1.	Kerangka Pikir Penyusunan Identifikasi CSR .....	2 -20
	Perkotaan Babat.....	3 - 1
Bagan 4.1.	Struktur Organisasi Penyusunan Identifikasi CSR Kabupaten Lamongan ..	4 - 3
Bagan 4.2.	Hubungan Kerja dengan Pihak Pemberi Pekerjaan Penyusunan Identifikasi CSR .....	4 - 3



# Bab-1

## PENDAHULUAN

---

Sebagai bagian dari lingkungan sosial, sebuah perusahaan selayaknya dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain, perusahaan memiliki tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi demi menciptakan kesejahteraan masyarakat dan kepekaan terhadap kondisi lingkungan sekitar. Tanggung jawab sosial inilah yang dikenal sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan direalisasikan ke dalam berbagai program dan kegiatan.

### 1.1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang ditetapkan sebagai salah satu kabupaten yang masuk dalam rencana kawasan strategis yang berada dalam lingkup pengelolaan pemerintah pusat yaitu Kawasan Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan) sebagai KSN.

Selain itu, Kabupaten Lamongan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011—2031, ditetapkan sebagai:

1. Kawasan ekonomi unggulan terdiri atas LIS (Lamongan Integrated Shorebase) dan sekitarnya di Kabupaten Lamongan,
2. Kawasan Agroindustri, yaitu Agroindustri Gelang (Gresik dan Lamongan) Utara;
3. Kawasan perbatasan antar kabupaten/kota meliputi Gerbangkertosusila (GKS) dan segitiga emas pertumbuhan Tuban–Lamongan–Bojonegoro

Fungsi dan peran yang ditetapkan tersebut diatas, didukung oleh potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Lamongan, yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan, sebagaimana uraian berikut : Berdasarkan data BPS pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan Tahun 2010 sebesar 6,89%, Tahun 2011 sebesar 7,08%, Tahun 2012 sebesar 7,12%, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,03%. Dan pada Tahun 2012 perekonomian Kabupaten Lamongan mampu tumbuh sebesar 7,12%, yang didukung tiga sektor utama yaitu bangunan dan konstruksi dengan kontribusi 12,11%, perdagangan, Hotel dan restaurant dengan kontribusi 9,12%, dan sektor jasa dengan kontribusi sebesar 8,72%.

Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan sebesar 7,03% menjadi acuan pertumbuhan bagi kabupaten Lamongan. Bila ditinjau pada tingkat kesejahteraan rakyat yang diukur dengan PDRB perkapita, dari tahun 2010 terus mengalami peningkatan yang signifikan yaitu tahun 2010 PDRB perkapita rata-rata masyarakat Kabupaten Lamongan sebesar 9.986.061 rupiah dan pada Tahun 2011 mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 10.771.552,25 rupiah. Ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamongan semakin meningkat.

Oleh karena itu, untuk mendukung fungsi dan peran yang ditetapkan kepada Kabupaten Lamongan serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan, perlu dilakukan upaya-upaya pembangunan.

Pembangunan merupakan proses perubahan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah yang menjadi penanggungjawab utama dalam mensejahterakan

masyarakat dan melestarikan lingkungan tidak akan sanggup menanggung beban tersebut jika dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan, salah satunya yang paling potensial adalah dari Dunia Usaha atau perusahaan, agar akselerasi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa tercapai. Dan salah satu bentuk partisipasi tersebut adalah dalam bentuk pelaksanaan Tanggungjawab sosial perusahaan atau **Corporate Social Responsibility (CSR)**.

Dunia usaha berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan pula faktor lingkungan hidup. Sekarang dunia usaha tidak lagi hanya memperhatikan catatan keuangan perusahaan semata (*single bottom line*), melainkan sudah meliputi aspek keuangan, aspek sosial, dan aspek lingkungan yang biasa disebut *triple bottom line*. Sinergi dari tiga elemen ini merupakan kunci dari konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

**Corporate Social Responsibility (CSR)** atau corporate citizenship dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dimaksudkan untuk mendorong dunia usaha lebih etis dalam menjalankan aktivitasnya agar tidak berpengaruh atau berdampak buruk pada masyarakat dan lingkungan hidupnya. Sehingga pada akhirnya dunia usaha akan dapat bertahan secara berkelanjutan untuk memperoleh manfaat ekonomi yang menjadi tujuan dibentuknya dunia usaha.

Program CSR yang berkelanjutan diharapkan akan dapat membentuk atau menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri. Setiap kegiatan tersebut akan melibatkan semangat sinergi dari semua pihak secara terus menerus membangun dan menciptakan kesejahteraan dan pada akhirnya akan tercipta kemandirian dari masyarakat yang terlibat dalam program tersebut.

Implementasi kebijakan CSR adalah suatu proses yang terus menerus dan berkelanjutan. Dengan demikian akan tercipta satu ekosistem yang menguntungkan semua pihak (*true win win situation*).

Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan arti pentingnya keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (*Profit-People-Planet*), kini, semakin banyak perusahaan yang memenuhi tanggung jawab sosialnya (CSR). Tanggung jawab sosial perusahaan tersebut diwujudkan dalam beragam bentuk kegiatan, dengan perusahaan sebagai pelaksana yang melibatkan mitra-mitra yang kompeten di bidangnya. Dukungan mitra kerja sama menjadi salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan program-program CSR.

Program CSR tidak selalu diwujudkan dalam bentuk kegiatan amal (*charity*). Melainkan, juga dapat dilaksanakan dalam program-program pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan masyarakat secara langsung sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan CSR yang dilakukan beberapa perusahaan sekarang ini sangat beragam. Demi memberikan manfaat secara luas, optimal, dan berkelanjutan, perusahaan membutuhkan mitra dalam pelaksanaan kegiatan CSR. Melalui mitra terpilih, perusahaan dapat memperoleh informasi mengenai kebutuhan masyarakat maupun program-program pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah. Selain itu, mitra perusahaan juga dapat memberikan konsultasi teknis, memfasilitasi kerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya, serta turut memberikan kontribusi nyata.

## 1.2 MANFAAT DARI PELAKSANAAN CSR

Terdapat beberapa manfaat yang didapatkan dari pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan, baik bagi perusahaan itu sendiri, bagi masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, manfaat yang akan diterima dari pelaksanaan CSR, diantaranya:

### 1. Bagi Perusahaan.

Terdapat empat manfaat yang diperoleh perusahaan dengan mengimplementasikan CSR. Pertama, keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan dan perusahaan mendapatkan citra yang positif dari masyarakat luas. Kedua, perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap modal (*capital*). Ketiga, perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia (*human resources*) yang berkualitas. Keempat, perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis (*critical decision making*) dan mempermudah pengelolaan manajemen risiko (*risk management*).

## **2. Bagi masyarakat,**

Praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilai-tambah adanya perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Pekerja lokal yang diserap akan mendapatkan perlindungan akan hak-haknya sebagai pekerja. Jika terdapat masyarakat adat atau masyarakat lokal, praktek CSR akan mengharagai keberadaan tradisi dan budaya lokal tersebut,

## **3. Bagi lingkungan,**

Praktik CSR akan mencegah eksploitasi berlebihan atas sumber daya alam, menjaga kualitas lingkungan dengan menekan tingkat polusi dan justru perusahaan terlibat mempengaruhi lingkungannya,

## **4. Bagi Negara,**

Praktik CSR yang baik akan mencegah apa yang disebut "corporate misconduct" atau malpraktik bisnis seperti penyuapan pada aparat negara atau aparat hukum yang memicu tingginya korupsi. Selain itu, negara akan menikmati pendapatan dari pajak yang wajar (yang tidak digelapkan) oleh perusahaan.

## **1.3. DASAR HUKUM**

Secara regulasi di Indonesia pelaksanaan CSR atau Tanggung Jawab sosial Perusahaan telah diatur dalam :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297) ;
3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan ;
4. Keputusan Menteri Negara BUMN/Kepala Badan Pembina BUMN No. Kep-216/M-PBUMN/1999 tanggal 28 September 1999 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN;
5. Keputusan Menteri Negara BUMN No. Kep-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
6. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
7. Peraturan Daerah <sup>daerah</sup> Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP)
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 52 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP),

dengan regulasi ini diharapkan dihasilkan keterpaduan dan sinergitas pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah dan masyarakat serta dunia usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pelestarian lingkungan hidup.

## **1.4. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN**

### **1.4.1. MAKSUD**

Melakukan identifikasi perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Lamongan yang sudah menerapkan CSR

### **1.4.2. TUJUAN**

Tersusunnya dokumen yang menggambarkan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Lamongan termasuk tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi demi menciptakan kesejahteraan masyarakat dan kepekaan terhadap kondisi lingkungan sekitar. Tanggung jawab sosial inilah yang

dikenal sebagai *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan direalisasikan ke dalam berbagai program dan kegiatan.

### **1.4.3. SASARAN**

Berdasarkan tujuan tersebut, maka sasaran yang ingin dicapai dalam Kegiatan Identifikasi SCR di Kabupaten Lamongan, adalah :

1. Teridentifikasinya Perusahaan-Perusahaan di Kabupaten Lamongan yang sudah menerapkan CSR
2. Teridentifikasinya jenis tanggungjawab sosial yang telah dan akan dilaksanakan oleh masing-masing perusahaan yang sudah menerapkan CSR
3. Terjalannya komunikasi antara perusahaan dengan Pemerintah Kabupaten Lamongan terkait rencana tanggungjawab sosial yang akan dilaksanakan

## **1.5. RUANG LINGKUP**

### **1.5.1. LINGKUP WILAYAH**

Lingkup wilayah studi adalah seluruh Kabupaten Lamongan yang secara administrasi terdiri dari 24 kecamatan dengan luas wilayah mencapai 181.280 ha, dengan batas administrasi sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto
- Sebelah Barat : Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro
- Sebelah Timur : Kabupaten Gresik

### **1.5.2. LINGKUP KEGIATAN**

Lingkup kegiatan penyusunan Kegiatan Identifikasi CSR di Kabupaten Lamongan, yaitu:

1. Persiapan,
2. Identifikasi perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Lamongan yang sudah menerapkan CSR
3. Kompilasi dan tabulasi perusahaan yang sudah menerapkan CSR berikut tanggungjawab sosial yang akan sudah dan akan dilaksanakan di Kabupaten Lamongan

## **1.6. SISTEMATIKA PENYUSUNAN**

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran, dasar hukum penyusunan serta ruang lingkup penyusunan yang meliputi lingkup bahasan, lingkup materi, lingkup wilayah.

### **BAB. 2. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN GAMBARAN UMUM WILAYAH PERENCANAAN**

Meliputi gambaran umum tentang batas administrasi, sosial kepedudukan, kondisi fisik dasar dan kondisi fisik binaan dari wilayah perencanaan

### **BAB. 3. LANDASAN TEORI DAN METODOLOGI PENYUSUNAN**

Merupakan tinjauan terhadap metode-metode yang dipergunakan dan cara pendekatan dalam menangani pekerjaan penyusunan Identifikasi CSR di Kabupaten Lamongan

**BAB. 4. RENCANA KERJA, JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN ORGANISASI KERJA**

Berisikan tentang tahapan pelaksanaan pekerjaan yang akan dilakukan oleh konsultan termasuk jadwal pelaksanaan untuk masing-masing kegiatan yang akan dilakukan oleh konsultan serta organisasi pelaksanaan pekerjaan

**BAB. 5. PELAPORAN**

Bab ini berisikan mekanisme pelaporan dari setiap laporan yang harus diserahkan oleh konsultan kepada pihak pemberi pekerjaan.



## Bab-2

# KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN GAMBARAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN

## 2.1. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Kebijakan pembangunan yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap Studi Identifikasi CSR di Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

### 2.1.1. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANDANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2005 - 2025

#### 1. Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi, maka RPJPD Kabupaten Lamongan akan berkedudukan sebagai kerangka dasar perencanaan dan penganggaran, program pelaksanaan rencana, pengendalian/ pengawasan/ pemantauan, pengelolaan kegiatan pembangunan, evaluasi dan peninjauan ulang kegiatan pembangunan secara jangka panjang (dua puluh tahun), serta menjadi bahan perbaikan bagi keberlanjutan pelaksanaan tahap pembangunan berikutnya.

RPJPD Kabupaten Lamongan juga akan digunakan sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun RPJMD yang berfungsi sebagai indikasi program dan kegiatan pembangunan yang pendanaannya dialokasikan dari APBN, APBD Provinsi Jawa Timur, dan APBD Kabupaten Lamongan. RPJMD juga berfungsi sebagai alat untuk mengukur kinerja Kepala Daerah. RPJMD ini kemudian akan dijabarkan sebagai perencanaan teknis operasional jangka waktu lima tahunan oleh SKPD dalam Renstra SKPD.

#### 2. VISI dan MISI Pembangunan Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025

##### VISI Pembangunan

Mewujudkan Lamongan sebagai Kabupaten yang Adil, Merata, Sejahtera dan berdaya Saing

##### MISI Pembangunan

1. Mewujudkan masyarakat Lamongan yang terdidik, bermoral dan berdaya saing untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya
2. Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi dan produktivitas sektor-sektor andalan daerah
3. Mewujudkan pembangunan daerah berupa sarana dan prasarana dasar (infrastruktur dan utilitas) yang memadai guna membuka daerah yang masih terisolir dan tertinggal
4. Mewujudkan Lamongan yang Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dengan 10 (sepuluh) prinsipnya, yaitu : 1) prinsip partisipasi, 2) Penegakan Hukum atau Supremasi Hukum, 3) Transparansi, 4) Kesetaraan, 5) Wawasan ke Depan, 6) Akuntabilitas, 7) Pengawasan, 8) efisiensi, 9) Efektivitas dan 10) Profesionalisme Aparatur.

5. Mewujudkan kemampuan dalam pendayagunaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamongan secara luas dan merata
6. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memahami kondisi kearifan dan nilai-nilai lokal

### 3. SASARAN Pembangunan JANGKA PANJANG Kabupaten Lamongan TAHUN 2005-2025

Tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025 adalah : Mewujudkan Lamongan sebagai kabupaten yang adil, merata, sejahtera, dan berdaya saing. Sebagai ukuran tercapainya tujuan tersebut maka pembangunan daerah dalam dua puluh tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran pokok sebagai berikut :

#### A. Terwujudnya masyarakat Lamongan yang sehat, terdidik, dan berdaya saing yang ditandai oleh :

- (1) Terciptanya sistem pendidikan yang baik, sehingga tidak hanya terjadi proses transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan lebih pada menanamkan dan membangun masyarakat terdidik, serta masyarakat yang cerdas dan berbudaya. Terwujudnya masyarakat yang memiliki kemudahan akses terhadap pendidikan berkualitas, berpendidikan dan berkompetensi tinggi, berdaya saing, bermoral, dan menerapkan nilai-nilai budaya lokal;
- (2) Terwujudnya kemampuan sumber daya manusia dalam menguasai, memanfaatkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) untuk menciptakan keunggulan kompetitif daerah;
- (3) Terwujudnya masyarakat Lamongan yang sehat jasmani, rohani dan sosial serta memiliki aksesibilitas yang baik terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah Lamongan;
- (4) Meningkatnya pemahaman dan penerapan perilaku hidup masyarakat yang bersih dan sehat, terutama pada tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, dan institusi kesehatan;
- (5) Meningkatnya kualitas pelayanan dan derajat kesehatan, serta mewujudkan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat secara bertahap ;
- (6) Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan komposit dari Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf serta Pendapatan Domestik Bruto Per-Kapita yang dihitung berdasarkan paritas daya beli (purchasing power parity).

#### B. Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah

- (1) Terwujudnya percepatan pertumbuhan ekonomi dengan berkembangnya potensi daerah yang unggul dan berdaya saing;
- (2) Meningkatnya pengembangan kawasan cepat tumbuh (growth pool) dan strategis sebagai pemicu pembangunan di Kabupaten Lamongan dengan pendekatan pembangunan kawasan terpadu dan pendekatan kluster kewilayahan yang terintegrasi dengan sentra-sentra produksi bahan baku serta sarana penunjangnya;
- (3) Berkembangnya agroindustri dan industri pengolahan skala rumah tangga dan kecil yang didukung oleh industri pengolahan skala menengah dan besar yang mempunyai daya saing tinggi untuk meningkatkan ekspor dan terpenuhinya kebutuhan lokal untuk membuka lapangan kerja di daerah dengan fasilitas penerapan teknologi dan sarana pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan di sentra-sentra produksi;
- (4) Optimalnya potensi sektor pertanian secara luas dikarenakan adanya peningkatan aksesibilitas dan produktivitas dengan inovasi terhadap komoditas peluang dan daya saing;

- (5) Berkembangnya ekonomi kerakyatan, peningkatan kegiatan sektor riil melalui investasi, mendorong kegiatan industri pengolahan, peningkatan kegiatan perdagangan dan dunia usaha, pemberdayaan sektor riil, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
  - (6) Berkembangnya akses terhadap permodalan dan peningkatan mutu, efisiensi produksi serta pemasaran;
  - (7) Meningkatnya kualitas pelayanan jasa/barang bagi dunia usaha, serta perbaikan kualitas birokrasi dan penegakan hukum;
  - (8) Meningkatnya kepastian dan perlindungan hukum melalui tertib administrasi dan pelayanan bagi dunia usaha di Kabupaten Lamongan;
  - (9) Berkembangnya infrastruktur penunjang seperti listrik, jalan, dan komunikasi di daerah-daerah;
  - (10) Meningkatnya ragam dan kualitas produk pariwisata serta promosi dan pemasaran, baik di dalam maupun di luar negeri;
  - (11) Tercapainya laju pertumbuhan ekonomi disertai dengan penciptaan lapangan kerja dan penurunan kemiskinan;
  - (12) Tercapainya pembangunan manusia dan penanggulangan kemiskinan untuk mempercepat pencapaian sasaran Millennium Development Goals (MDGs) tahun 2015;
  - (13) Tercapainya kemandirian keuangan daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Asli Daerah. an Asli Daerah. dan atau agenda pembangunan jangka panjang Lamongan.
- C. Terwujudnya pembangunan daerah berupa prasarana dasar (infrastruktur dan utilitas) dan peningkatan investasi guna membuka daerah yang masih terisolir dan tertinggal.
- (1) Berkembangnya perundang-undangan yang mendukung iklim investasi di Kabupaten Lamongan;
  - (2) Meningkatnya kualitas kelembagaan dan tenaga pengajar yang berkompentensi tinggi;
  - (3) Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana kesehatan, serta pendidikan di seluruh pelosok Lamongan;
  - (4) Tersedianya pemukiman sehat bagi semua kalangan beserta sarana pendukung tempat tinggal lainnya seperti air bersih, sanitasi, dan kelistrikan;
  - (5) Berkembangnya jaringan pos dan telekomunikasi ke seluruh pelosok Lamongan;
  - (6) Tersedianya sarana transportasi dan jalan raya yang akan meningkatkan mobilitas dan distribusi barang dan jasa yang akan secara langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan dan pemerataan perekonomian;
  - (7) Meningkatnya peran serta swasta dalam pembangunan infrastruktur
- D. Terwujudnya Lamongan yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.
- (1) Berkembangnya kelembagaan secara menyeluruh yang mencakup:
    - Proses pembangunan yang meliputi formulasi kebijakan (policy fomulation), perencanaan (planning), penganggaran (budgeting), dan penetapan peraturan (legislation);
    - Peranan dan tanggung jawab lembaga negara, pemerintah, dan masyarakat;
    - Sistemorganisasi, yang meliputi lembaga pemerintah di berbagai sektor dandaerah, lembaga negara, dan lembaga masyarakat;

- Insentif dalam pembangunan, yang mampu meningkatkan inovasi masyarakat dalam pembangunan;
  - Kerangka legal, yang lebih memperhatikan kondisi masyarakat;
- (2) Diterapkannya akuntabilitas dengan penetapan target kuantitatif atas pencapaian suatu program;
  - (3) Terpilihnya efektivitas suatu pengeluaran dengan pemantauan yang berdasarkan pada pencapaian target berbagai indikator kinerja (performance indicators) yang ditetapkan sebelumnya dan menunjukkan tingkat keberhasilan suatu program secara menyeluruh;
  - (4) Terpilihnya mekanisme pertanggungjawaban publik secara reguler dan verifikasi untuk efektivitas dan efisiensi pelaporan;
  - (5) Diterapkannya mekanisme yang jelas dalam menangani pengaduan dan keluhan.
- E. Terpilihnya kemampuan Kabupaten Lamongan dalam pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.
- (1) Berkembangnya perundang-undangan yang melindungi ekosistem dan kelangsungan lingkungan hidup;
  - (2) Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang efektif berdasarkan tata kelola yang baik melalui perumusan kebijakan yang berwawasan lingkungan
  - (3) Terpilihnya pemanfaatan ruang secara serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan berdasarkan rencana tata ruang yang telah disepakati;
  - (4) Penegakan sanksi terhadap usaha pelanggaran dan persusakan lingkungan hidup.
- F. Terpilihnya tatanan kehidupan masyarakat yang tentam, tertib dan aman sebagai penunjang efektivitas pembangunan.
- (1) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kenukunan antar kelompok masyarakat;
  - (2) Meningkatkan kesadaran swakarsa masyarakat untuk menjaga ketertarikan dan ketertiban;
  - (3) Meningkatkan perlindungan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan aparat pemerintah dan swadaya masyarakat;
  - (4) Berkembangnya budaya hukum di masyarakat agar tercapa kesadaran dan kepatuhan hukum;
  - (5) Meningkatkan integritas dan profesionalitas aparat penegak hukum untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat;
  - (6) Terpilihnya lembaga peradilan yang mandiri dan independen yang mengayomi pada masyarakat;
  - (7) Terpilihnya lembaga kemasyarakatan sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat serta antar warga masyarakat dalam kegiatan;
  - (8) Terpilihnya kerjasama dengan lembaga kemasyarakatan tingkat desa/kelurahan sehingga berkembangnya kegiatan dan komunikasi antar desa;
  - (9) Tumbuhnya kesadaran, sikap dan tingkah laku serta pola hidup dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang berdasarkan nilai-nilai daerah dan budaya bangsa Indonesia.

## **ARAH PEMBANGUNAN**

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan, Arah Pembangunan Jangka Panjang selama kurun waktu 20 tahun mendatang adalah sebagai berikut :

- A. Mewujudkan masyarakat Lamongan yang sehat, terdidik, dan berdaya saing.
- (1) Menerapkan sistem pendidikan yang baik, menjadikan manusia tidak hanya sebagai subyek yang mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan lebih pada menanamkan dan membangun masyarakat terdidik, serta masyarakat yang cerdas dan berbudaya. Masyarakat harus memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas, memiliki tingkat pendidikan dan kompetensi yang tinggi, berdaya saing, bermoral, dan menerapkan nilai-nilai budaya lokal ;
  - (2) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam menguasai, memanfaatkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) untuk menciptakan keunggulan kompetitif daerah ;
  - (3) Membangun masyarakat Lamongan yang sehat jasmani, rohani dan sosial serta memiliki aksesibilitas yang baik terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah Lamongan ;
  - (4) Meningkatkan pemahaman dan penerapan perilaku hidup masyarakat yang bersih dan sehat, terutama pada tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, dan institusi kesehatan;
  - (5) Meningkatkan kualitas pelayanan dan derajat kesehatan, serta mewujudkan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat secara bertahap;
  - (6) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan komposit dari Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf serta Pendapatan Domestik Bruto Per-Kapita yang dihitung berdasarkan paritas daya beli (purchasing power parity).
- B. Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.
- (1) Mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi dengan berkembangnya potensi daerah yang unggul dan berdaya saing;
  - (2) Meningkatkan pengembangan kawasan cepat tumbuh (growth pool) dan strategis sebagai pemicu pembangunan di Kabupaten Lamongan dengan pendekatan pembangunan kawasan terpadu dan pendekatan kluster kewilayahan yang terintegrasi dengan sentra-sentra produksi bahan baku serta sarana penunjangnya;
  - (3) Mengembangkan agroindustri dan industri pengolahan skala rumah tangga dan kecil yang didukung oleh industri pengolahan skala menengah dan besar yang mempunyai daya saing tinggi untuk meningkatkan ekspor dan terpenuhinya kebutuhan lokal untuk membuka lapangan kerja di daerah dengan fasilitas penerapan teknologi dan sarana pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan di sentra-sentra produksi;
  - (4) Mengoptimalkan potensi sektor pertanian secara luas dikarenakan adanya peningkatan aksesibilitas dan produktivitas dengan inovasi terhadap komoditas unggulan daerah yang memiliki peluang dan daya saing;
  - (5) Mengembangkan ekonomi kerakyatan, peningkatan kegiatan sektor riil melalui investasi, mendorong kegiatan industri pengolahan, peningkatan kegiatan perdagangan dan dunia usaha, pemberdayaan sektor riil, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
  - (6) Mengembangkan akses terhadap permodalan dan peningkatan mutu, efisiensi produksi serta pemasaran;
  - (7) Meningkatkan kualitas pelayanan jasa/barang bagi dunia usaha, serta perbaikan kualitas birokrasi dan penegakan hukum;

- (8) Meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum melalui tertib administrasi dan pelayanan bagi dunia usaha di Kabupaten Lamongan;
  - (9) Mengembangkan infrastruktur penunjang seperti listrik, jalan, dan komunikasi di daerah-daerah;
  - (10) Meningkatkan ragam dan kualitas produk pariwisata serta promosi dan pemasaran, baik di dalam maupun di luar negeri;
  - (11) Mencapai laju pertumbuhan ekonomi disertai dengan penciptaan lapangan kerja dan penurunan kemiskinan;
  - (12) Mencapai pembangunan manusia dan penanggulangan kemiskinan untuk mempercepat pencapaian sasaran Millennium Development Goals (MDGs) tahun 2015;
  - (13) Mencapai kemandirian keuangan daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Asli Daerah. an Asli Daerah dan atau agenda pembangunan jangka panjang Lamongan.
- C. Mewujudkan pembangunan daerah berupa prasarana dasar (infrastruktur dan utilitas) dan peningkatan investasi yang memadai guna membuka daerah yang masih terisolir dan tertinggal.
- (1) Mengembangkan perundang-undangan yang mendukung iklim investasi di Kabupaten Lamongan ;
  - (2) Meningkatkan kualitas kelembagaan dan tenaga pengajar yang berkompentensi tinggi;
  - (3) Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana kesehatan, serta pendidikan di seluruh pelosok Lamongan;
  - (4) Pembangunan pemukiman sehat bagi semua kalangan dengan memperhatikan tata ruang dan sarana pendukung tempat tinggal lainnya seperti air bersih, sanitasi, dan kelistrikan;
  - (5) Pengembangan jaringan pos dan telekomunikasi ke seluruh pelosok Lamongan;
  - (6) Pembangunan sarana transportasi dan jalan raya yang berarti akan meningkatkan mobilitas dan distribusi barang dan jasa yang akan secara langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan dan pemerataan perekonomian;
  - (7) Meningkatkan peran serta swasta dalam pembangunan Infrastruktur .
- D. Mewujudkan Lamongan yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), dean government (pemerintah yang bersih), transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.
- (1) Pengembangan kelembagaan secara menyeluruh yang mencakup: 1) proses pembangunan yang meliputi formulasi kebijakan (policy formulation), perencanaan (planning), penganggaran (budgeting), dan penetapan peraturan (legislation); 2) peranan dan tanggung jawab lembaga negara, pemerintah, dan masyarakat; 3) sistem organisasi, yang meliputi lembaga pemerintah di berbagai sektor dan daerah, lembaga negara, dan lembaga masyarakat; 4) insentif dalam pembangunan, yang mampu meningkatkan inovasi masyarakat dalam pembangunan;
  - (2) Kerangka legal, yang lebih memperhatikan kondisi masyarakat;
  - (3) Implementasi akuntabilitas dengan penetapan target kuantitatif atas pencapaian suatu program;
  - (4) Menjaga efektivitas suatu pengeluaran dengan pemantauan yang berdasarkan pada pencapaian target berbagai indikator kinerja (performance indicators) yang ditetapkan sebelumnya dan menunjukkan tingkat keberhasilan suatu program secara menyeluruh;

- (5) Menciptakan mekanisme pertanggungjawaban publik secara reguler dan verifikasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaporan;
  - (6) Penerapan mekanisme yang jelas dalam menangani pengaduan dan keluhan.
- E. Mewujudkan kemampuan Kabupaten Lamongan dalam pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan dengan memanfaatkan seoptimal mungkin sumber daya alam dan memberikan perlindungan fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan, berkeadilan, dan berkeselimbangan; untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamongan.
- (1) Mengembangkan perundang-undangan yang melindungi ekosistem dan Kelangsungan lingkungan hidup ;
  - (2) Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang efektif berdasarkan tata kelola yang baik melalui perumusan kebijakan yang berwawasan lingkungan ;
  - (3) Memanfaatkan ruang secara serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan berdasarkan rencana tata ruang yang telah disepakati
  - (4) Penegakan sanksi terhadap usaha pelanggaran dan perusakan lingkungan hidup.
- F. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang tenram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memahami kondisi kearifan dan nilai-nilai budaya lokal.
- (1) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antarkelompok masyarakat;
  - (2) Meningkatkan kesadaran swakarsa masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban;
  - (3) Meningkatkan perlindungan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan aparat pemerintah dan swadaya masyarakat;
  - (4) Mengembangkan budaya hukum di masyarakat agar tercipta kesadaran dan ketaatan hukum;
  - (5) Meningkatkan integritas dan profesionalitas aparatur penegak hukum untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat;
  - (6) Mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang mandiri dan independen guna mewujudkan pengayoman pada masyarakat;
  - (7) Menjadikan lembaga kemasyarakatan sebagai sarana komunikasi antara Pemerintah dan masyarakat serta antar warga masyarakat dalam kegiatan;
  - (8) Membina kerjasama dengan antara lembaga kemasyarakatan tingkat desa/kelurahan guna menumbuh kembangkan kegiatan dan komunikasi antar desa;
  - (9) Menumbuhkan kesadaran, sikap, dan tingkah laku serta pola hidup dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang berdasarkan nilai-nilai daerah dan budaya bangsa Indonesia dengan melakukan berbagai pendidikan, pelatihan, seminar

## 2.1.2. RTRW KABUPATEN LAMONGAN

Berdasarkan RTRW Kabupaten Lamongan, ditetapkan kawasan strategis sebagai berikut :

1. Kawasan ekonomi unggulan terdiri atas LIS (Lamongan Integrated Shorebase) dan sekitarnya di Kabupaten Lamongan,
2. Kawasan Agroindustri, yaitu Agroindustri Gelang (Gresik dan Lamongan) Utara;
3. Kawasan perbatasan antar kabupaten/kota meliputi Gerbangkertosusila (GKS) dan segitiga emas pertumbuhan Tuban–Lamongan–Bojonegoro

## 2.2. GAMBARAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN

### 2.2.1. KONDISI FISIK DAN SUMBER DAYA ALAM

Kondisi fisik dan sumberdaya alam di Kabupaten Lamongan dapat dilihat dari letak geografis dan administratif, sumberdaya tanah, sumberdaya udara dan sumberdaya air yang ada. Secara umum gambaran Kabupaten Lamongan dari aspek fisik dan sumberdaya alam sebagaimana berikut :

#### 2.2.1.1. LETAK GEOGRAFIS DAN ADMINISTRATIF

Secara geografis Kabupaten Lamongan terletak antara 6° 51' 54" sampai dengan 7° 23' 6" Ulang Selatan dan antara 112° 4' 41" sampai dengan 112° 33' 12" Bujur Timur, dengan batas administrasi sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kabupaten Gresik
- Sebelah Selatan : Kabupaten Jombang dan Mojokerto
- Sebelah Barat : Kabupaten Bojonegoro dan Tuban

Kabupaten Lamongan memiliki luas 181.280 ha, terdiri dari 27 kecamatan, 474 desa/kelurahan (462 desa dan 12 kelurahan)

#### 2.2.1.2. SUMBERDAYA TANAH

##### a. Topografi

Topografi Kab. Lamongan berbentuk "cekung" artinya wilayah bagian utara dan selatan merupakan dataran tinggi sedangkan wilayah bagian tengah merupakan dataran rendah serta di lewati sungai terpanjang di Jawa yakni Sungai Bengawan Solo, sehingga rawan sekali terhadap banjir.

Secara topografi Kabupaten Lamongan berada pada ketinggian 0->100 meter di atas permukaan laut dengan perincian sebagai berikut : dataran rendah berawa dengan ketinggian 0-25 meter di atas permukaan laut seluas 50,17% dari luas Kabupaten Lamongan, ketinggian 25-100 meter di atas permukaan laut seluas 45,68% dan sisanya 4,15% merupakan dataran dengan ketinggian >100 meter di atas permukaan laut.

##### b. Kelerengan

Berdasarkan kelerengan, Kabupaten Lamongan berada pada kelerengan 0% - >40% dengan perincian sebagai berikut :

- Kelerengan 0-2% : luas 131.352 ha atau 72,46% dari luas Kabupaten Lamongan dan tersebar di seluruh kecamatan kecuali Paciran.
- Kelerengan 3-15% : luas 40.474 ha tau 22,33% dari luas Kabupaten Lamongan dan tersebar di kecamatan Sukorame, Bluluk, Ngimbang, Sambeng, Mantup, Kembangbahu, Sugio, Kedungpring, Modo, Babat dan Pucuk.
- Kelerengan 16-40% : luas 9.172 ha atau 5,06% dari luas Kabupaten Lamongan tersebar di Kecamatan Bluluk, Ngimbang, Sambeng, Mantup, Sugio, Kedungpring, Modo, Babat, Solokuro, Paciran, Brondong.
- Kelerengan >40% : 282 atau 0,16% dari luas Kabupaten Lamongan dan tersebar di Kecamatan Sambeng dan Paciran

##### c. Jenis Tanah

Berdasarkan jenis tanahnya, Kabupaten Lamongan dibagi menjadi 8 (delapan) jenis tanah dengan perincian sebagai berikut : Alufial hidromorf seluas 250 ha atau 0,14% dari luas Kabupaten Lamongan, alufial kelabu kekuningan seluas 68.810 ha atau 37,96% dari luas Kabupaten Lamongan, Assosiasi Hidromorf seluas 600 ha tau 0,33% dari luas Kabupaten

Lamongan, litosol seluas 7.659 ha atau 4,22% dari luas Kabupaten Lamongan, regosol coklat kekuningan seluas 350 ha atau 0,19%, grumosol kelabu seluas 2.125 ha atau 1,17%, kompleks grumosol kelabu litosol seluas 78.990 ha atau 43,57% dari luas Kabupaten Lamongan dan kompleks mediteran merah dan litosol seluas 22.496 ha atau 12,41% dari luas Kabupaten Lamongan

d. Jenis Batuan Induk

Berdasarkan jenis batuan, Kabupaten Lamongan dibagi menjadi 6 (enam) jenis batuan dengan rincian sebagai berikut : aluvium seluas 67.785 ha atau 37,39% dari luas Kabupaten Lamongan, Plistosen, fasies Gunung api seluas 2.500 ha atau 1,385 dari luas Kabupaten Lamongan, plistosen, fasies sedimen seluas 67.001 ha atau 36,96% dari luas Kabupaten Lamongan, plistosen, fasies batugamping seluas 5.775 ha atau 3,19% dari luas Kabupaten Lamongan, miosen, fasies sedimen seluas 20.450 ha atau 11,28% dan oligosin, fasies sedimen seluas 17.769 ha atau 9,80% dari luas Kabupaten Lamongan

e. Klimatologi

Seperti daerah – daerah lain di pulau Jawa, iklim Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan dipengaruhi oleh iklim tropika yang terdiri dari dua musim yang berbeda, yaitu musim kemarau yang terjadi pada bulan April sampai Oktober, dan musim hujan yang terjadi pada bulan Oktober sampai April. Temperatur bulanan rata – rata relatif konstan yaitu berkisar antara 25° - 32 °. Curah Hujan di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan tergolong type D yang berarti keadaan daerah secara umum tergolong daerah kering.

Di wilayah Kabupaten Lamongan terdapat 26 (dua puluh enam) stasiun curah hujan biasa yang tersebar di wilayah kabupaten Lamongan yang berada di bawah kepemilikan Dinas Pengairan Kabupaten Lamongan. Namun pada Kecamatan Babat hanya terdapat 1 (satu) stasiun curah hujan yaitu stasiun Babat yang mewakili dan dapat dipakai dalam analisa Hidrologi.

f. Zona Rawan Bencana Alam (Kawasan Rawan Banjir)

Bencana alam berupa banjir secara umum disebabkan oleh aliran permukaan yang berlebihan dengan intensitas hujan tinggi dengan durasi yang cukup lama dan pendangkalan sungai cukup tinggi sehingga mengurangi kapasitas pengaliran. Kabupaten Lamongan dilewati sungai bengawan Solo sepanjang ± 60 Km, dimana posisinya di hilir sungai. Terkait dengan hal tersebut maka kabupaten rawa terjadinya banjir laupn dari bengwan Solo tersebut, disamping itu permukaan banjir sungai Bengawan Solo melebihi elevasi wilayah permukiman sehingga sulit untuk membuang air hujan ke sungai Bengawan Solo, sehingga masih sering terjadi banjir-banjir lokal. Wilayah peka bencana Kabupaten Lamongan sebagian besar karena berada pada wilayah yang mempunyai ketinggian 0 – 7 m.

## 2.2.2. PENGGUNAAN LAHAN

Penggunaan lahan di Kabupaten Lamongan masih didominasi oleh lahan tidak terbangun seluas 167.615 ha atau 92,46 % dari Luas Wilayah Kabupaten Lamongan, sedangkan lahan terbangun mencapai 13.665 ha atau 7,54% dari luas wilayah.

Lahan tidak terbangun di Kabupaten Lamongan berupa sawah, ladang, tambak, hutan, perkebunan yang tersebar di seluruh kecamatan, sedangkan lahan terbangun pada umumnya terkonsentrasi di Ibukota Kabupaten, Ibukota Kecamatan dan sepanjang jalan arteri yang didominasi oleh peruntukan permukiman. Untuk lebih jelasnya lihat Tabel 2.1, diagram 2.1 dan Gambar 2.2.

**Diagram 2.1.**  
**Prosentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Lamongan**



**Tabel 2.1.**  
**Jenis dan Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Lamongan**

No	Jenis Penggunaan	Luas (Ha)	Prosentase (%)
1.	Sawah		
	- Sawah Teknis	17.186	9.48
	- Sawah Setengah Teknis	18.697	10.31
	- Sawah Sederhana	14.908	8.22
	- Sawah Desa/Non PU	6.560	3.62
	- Sawah Tadah Hujan	36.039	19.88
	- Sawah Pasang Surut	231	0.13
	- Lainnya	235	0.13
2.	Pekarangan, Bangunan & Halaman	13.665	7.54
3.	Tegal/kebun	30.287	16.71
4.	Ladang/huma	1.694	0.93
5.	Padang Rumput	2	0.00
6.	Hutan Rakyat	1.001	0.55
7.	Hutan Negara	27.797	15.33
8.	Perkebunan	315	0.17
9.	Lainnya	8.547	4.71
10.	Rawa	798	0.44
11.	Tambak	743	0.41
12.	Kolam/Ermpang	2.576	1.42
	Jumlah	181.280	100.00

Sumber : Kabupaten Lamongan Dalam Angka

## 2.2.3. SUMBERDAYA MANUSIA (KEPENDUDUKAN)

### 2.2.3.1 JUMLAH PENDUDUK

Jumlah penduduk Kabupaten Lamongan mengalami penambahan tiap tahunnya. Dari data Kabupaten Lamongan Dalam Angka, menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Lamongan pada Tahun 2008 sebesar 1.439.886 jiwa yang terdiri dari 719.567 jiwa penduduk laki-laki dan 720.319 jiwa penduduk perempuan. Kepadatan Penduduk Kabupaten Lamongan rata-rata mencapai 7,77 jiwa/ha dengan kepadatan tertinggi berada di Kecamatan Paciran, Lamongan, Maduran, Babat.

### 2.1.3.2 PERTAMBAHAN DAN PERTUMBUHAN PENDUDUK

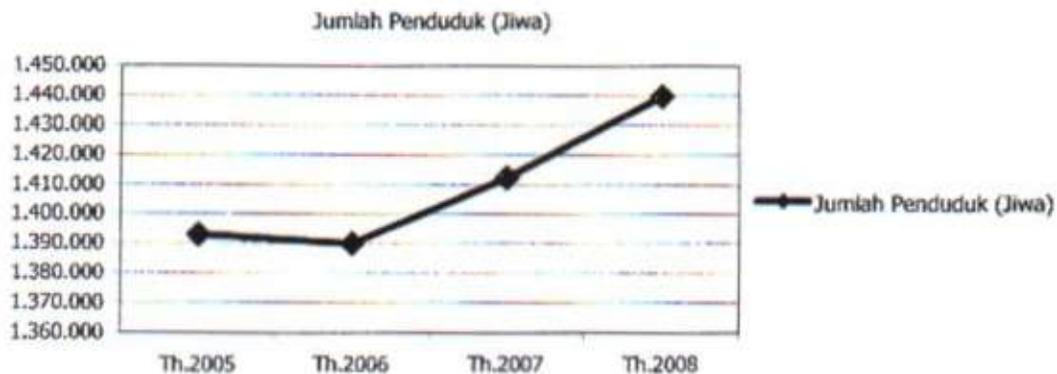
Jumlah Penduduk Kabupaten Lamongan dari tahun 2005 sampai tahun 2006 mengalami penurunan, kemudian mengalami kenaikan kembali pada Tahun 2007 sampai Tahun 2008. rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Lamongan dari tahun 2005 sampai tahun 2008 mencapai 15.584 jiwa/tahun dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata 1,1%/tahun. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 2.2. dan Diagram 2.2.

Tabel 2.2.  
Jumlah Penduduk Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2008

No	Tahun	Luas (Ha)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Kepadatan (Jiwa/Ha)
1.	2005	181.280	1.393.134		7.68
2.	2006	181.280	1.390.053	-0.2	7.67
3.	2007	181.280	1.412.386	1.6	7.79
4.	2008	181.280	1.439.886	1.9	7.94
Rata-rata				1.1	7.77

Sumber : Kabupaten Lamongan Dalam Angka Tahun 2009

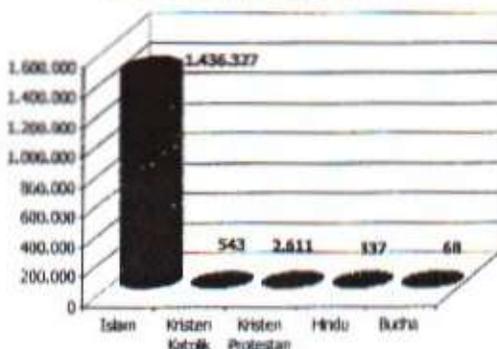
Diagram 2.2.  
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Lamongan dari Tahun 2005-2008



### 2.2.3.3 JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA

Berdasarkan agama yang dianut, terlihat bahwa Kabupaten Lamongan didominasi oleh penduduk yang beragama Islam dengan jumlah 1.436.327 jiwa atau 99,75% dari jumlah penduduk Kabupaten Lamongan, disusul kemudian pemeluk Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu dan Budha sebagaimana terlihat pada Tabel 2.3 dan Diagram 2.3.

Diagram 2.3.  
Jumlah Penduduk menurut Agama yang Dianut Kab. Lamongan Tahun 2008



Tabel 3.3.  
Jumlah Penduduk Kabupaten Lamongan Berdasarkan Pemeluk Agama Tahun 2008

No	Agama	Tahun 2008	Prosentase (%)
1.	Islam	1.436.327	99,75
2.	Kristen Katolik	543	0,04
3.	Kristen Protestan	2.611	0,18
4.	Hindu	337	0,02
5.	Budha	68	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.439.886</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Kabupaten Lamongan Dalam Angka Tahun 2009

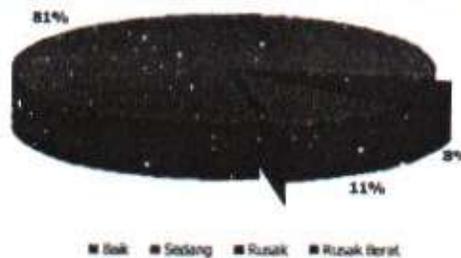
## 2.2.4. SUMBERDAYA BUATAN (SARANA DAN PRASARANA)

Sumberdaya buatan dari Kabupaten Lamongan dapat dilihat dari sistem transportasi yang ada, jaringan energi dan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih, persampahan, sanitasi, drainase dan fasilitas pelayanan umum

### 2.1.4.1. SISTEM TRANSPORTASI

Kabupaten Lamongan merupakan wilayah yang cukup strategis dan perkembangannya cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Untuk mendukung perkembangan Kabupaten Lamongan yang cukup pesat, ketersediaan sistem transportasi yang memadai sangat diharapkan.

Diagram 2.4.  
Prosentase Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten Lamongan Tahun 2008



Sistem transportasi di Kabupaten Lamongan bertumpu pada sistem transportasi darat baik jalan maupun kereta api. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Lamongan berusaha memaksimalkan kondisi ruas-ruas jalan yang ada di Kabupaten Lamongan sebagai salah satu roda penggerak ekonomi kabupaten.

Berdasarkan data dari Kabupaten Lamongan Dalam Angka, secara keseluruhan panjang jalan di Kabupaten Lamongan mencapai 474,59 km terdiri dari 70,63 km jalan negara; 57,32 km jalan provinsi dan 346,73 km merupakan jalan kabupaten.

Dilihat dari jenis permukaan jalan, 443,11 km merupakan jalan aspal. Sedangkan bila dilihat dari kondisi jalan maka 384,20 km dalam kondisi baik, 38,04 km dalam kondisi sedang dan 52,31 km dalam kondisi rusak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.4 dan Diagram 3.4. Selain transportasi jalan raya, Kabupaten Lamongan juga dilalui oleh jalan kereta api yang menghubungkan Surabaya – Lamongan – Jakarta.

Tabel 2.4.  
Panjang Jalan Menurut Kondisi Permukaan Jalan

Kondisi Jalan	Jalan Negara	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten
<b>Jenis Permukaan</b>			
a. Aspal	70.63	56.93	315.56
b. Kerikil	-	-	-
c. Tanah	-	0.3	-
<b>Jumlah</b>	<b>70.63</b>	<b>57.23</b>	<b>315.56</b>
<b>Kondisi Jalan</b>			
a. Baik	46.95	42.53	294.72
b. Sedang	23.64	14.4	-
c. Rusak	-	-	52.01
d. Rusak Berat	-	0.3	-
<b>Jumlah</b>	<b>70.59</b>	<b>57.23</b>	<b>346.73</b>
<b>Kelas Jalan</b>			
a. Kelas I	-	-	-
b. Kelas II	34.26	-	-
c. Kelas III	-	-	-
d. Kelas IIIA	36.37	57.23	171.49
e. Kelas IIIB	-	-	166.32
f. Kelas IIIC	-	-	8.93
<b>Jumlah</b>	<b>70.63</b>	<b>57.23</b>	<b>346.74</b>

Sumber : Kabupaten Lamongan Dalam Angka Tahun 2009

## 2.2.4.2. JARINGAN ENERGI DAN LISTRIK

Sebagian besar wilayah di Kabupaten Lamongan sudah terlayani oleh jaringan listrik. Berdasarkan data dari Kabupaten Lamongan Dalam Angka Tahun 2010, menunjukkan bahwa jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Lamongan yang terbagi menjadi 3 (tiga) UPJ yaitu UPJ Babat, Paciran dan Lamongan mencapai 212.786 pelanggan, yang terbagi menjadi pelanggan rumah tangga, sosial, usaha multiguna dan hotel, industri, kantor/gedung serta jalan sebagaimana terlihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5.  
Banyaknya Pelanggan Listrik di Kabupaten Lamongan Tahun 2008

No	Golongan Tarif	Pelanggan			Jumlah
		UPJ Babat	UPJ Paciran	UPJ Lamongan	
1	Rumah Tangga	52.918	30.541	105.812	189.271
2	Sosial	1.526	879	3.464	5.869
3	Usaha Multiguna dan Hotel	4.260	4.392	8.054	16.706
4	Industri	25	22	25	72
5	Gedung/Kantor	148	113	251	512
6	Jalan	76	75	205	356
	<b>Jumlah</b>	<b>58.953</b>	<b>36.022</b>	<b>117.811</b>	<b>212.786</b>

Sumber : Kabupaten Lamongan Dalam Angka Tahun 2009

## 2.2.4.3. JARINGAN TELEPON

Untuk memenuhi kebutuhan telekomunikasi, Kabupaten Lamongan sudah terlayani oleh sistem telepon otomat. Namun dengan perkembangan teknologi saat ini, masyarakat lebih menyukai telepon seluler dengan tarif yang sangat murah dan dapat menjangkau seluruh wilayah.

## 2.1.4.4. JARINGAN AIR BERSIH

Sarana sanitasi lingkungan yang ada di Kabupaten Lamongan, dapat dijelaskan dari jenis sarana air bersih yang digunakan oleh masyarakat dan kondisi pengelolaan kebersihan. Saat ini, kebutuhan air bersih bagi rumah tangga di wilayah perdesaan pada umumnya dicukupi oleh sumur gali (sumur tradisional), sumur pompa tangan, dan pemanfaatan sumber air dengan menggunakan jaringan perpipaan yang dikelola oleh masyarakat desa (HIPPAM). Sedangkan untuk masyarakat di wilayah perkotaan, kebutuhan air dicukupi dari sumur gali (sumur tradisional), sumur pompa tangan, dari air bersih yang dikelola oleh PDAM. Untuk lebih jelasnya perkembangan sarana dan pemakaian air minum di Kabupaten Lamongan sebagaimana terlihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6.  
Perkembangan Sarana dan Pemakaian Air Minum Kabupaten Lamongan Tahun 2004-2008

No	Uraian	Satuan	2004	2005	2006	2007	2008
1	Jumlah PAM	Unit	1	1	1	1	1
2	Jumlah Kapasitas Produksi	Lt/dt	183	183	198	190	265
3	Jumlah Kapasitas Distribusi	Lt/dt	153	153	158	188	232
4	Jumlah Kapasitas Kebutuhan	Lt/dt	116	116	125	145	148
5	Jumlah Tempat Penjualan	Buah	11	11	12	12	12
6	Jumlah Tandon Air	Buah	10	10	10	11	11
7	Panjang Pipa	Km	391	391	386	408	409
8	Jumlah Pompa sebagai alat bantu penyaluran	Buah	31	31	31	32	33
9	Jumlah Air yang diproduksi	000 m3	3.842	3.842	4.796	5.172	5.533
10	Jumlah air yang didistribusikan	000 m3	3.492	3.492	3.590	3.870	4.385
11	Jumlah Air yang terjual	000 m3	2.362	2.362	1.609	2.709	2.745
12	Jumlah Pelanggan						
	- Perumahan/RT	Buah	10.742	10.742	11.035	11.118	11.101
	- Perdagangany/Usaha	Buah	566	566	604	638	678
	- Industri	Buah	5	5	6	6	9
	- Pelayanan Masyarakat	Buah	149	149	155	155	155
13	Rata-rata Konsumsi	Lt/org/hr	140	140	180	227	128
14	Hilang Air selama Produksi	%	10	10	10	11	21
15	Hilang Air Selama Distribusi	%	32	32	31	36	37
16	Jumlah Pendapatan yang diterima	Rp. Juta	3.797	4.247	4.250	4.046	6.075
17	Jumlah Investasi	Rp. Juta	745	358	2.047	4.349	1.747

Sumber : Kabupaten Lamongan Dalam Angka Tahun 2009

#### 2.2.4.5. PERSAMPAHAN

Untuk pemenuhan kebutuhan persampahan, banyak cara yang dipergunakan oleh masyarakat . Pada umumnya penduduk yang berada di wilayah Ibukota Kabupaten membuang sampah melalui tempat-tempat sampah yang ada dan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Sedangkan untuk masyarakat perdesaan pada umumnya masih menggunakan tradisi yang biasa dilakukan yaitu membakar atau menimbun di pekarangan.

#### 2.2.4.6. SANITASI

Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Lamongan sudah memiliki WC di masing-masing rumah. Namun pada beberapa wilayah masih dijumpai masyarakat yang memanfaatkan sungai untuk mandi dan cuci.

#### 2.2.4.7. FASILITAS PELAYANAN UMUM

Failitas pelayanan umum yang dimiliki Kabupaten Lamongan diantaranya fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, fasilitas perdagangan dan jasa serta fasilitas pemerintahan.

##### 1. Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan yang dimiliki Kabupaten Lamongan mulai dari tingkat TK sampai PT dengan jumlah sebagai berikut : TK sebanyak 934 unit terdiri dari TK Negeri sebanyak 2 unit, dan 932 TK Swasta. Untuk SD Kabupaten Lamongan memiliki 647 unit SD yang tersebar di seluruh kecamatan baik SD negeri maupun swasta, SLTP sebanyak 140 unit terdiri dari SMP Negeri, swasta dan SMP terbuka. SLTA sebanyak 26 unit terdiri dari SMA Negeri dan swasta, SMK sebanyak 61 unit, PT sebanyak 6 unit. Sedangkan MI sebanyak 531 unit, MTs sebanyak 167 unit dan MA sebanyak 74 unit. Untuk lebih jelasnya lihat Tabel 2.7.

Tabel 2.7.  
Banyaknya Sekolah, Guru dan Murid  
di Kabupaten Lamongan Tahun 2008

No	Fasilitas Pendidikan	Jumlah Gedung Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Murid
1	TK			
	- Negeri	2	15	184
	- Swasta	932	2.918	31.286
2	SD			
	- Negeri	622	6.190	68.346
	- Swasta	15	216	1.848
3	SMP			
	- Negeri	48	1.746	28.409
	- Swasta	85	1.786	11.651
	- Terbuka	7	70	367
4	SMA			
	- Negeri	13	668	8.743
	- Swasta	13	1.391	10.733
5	SMK			
	- Negeri	6	199	2.182
	- Swasta	49	1.428	13.139
6	PT	6	-	-
7	RA			
	- Negeri	184	521	5.763
	- Swasta	-	-	-
8	MI			
	- Negeri	3	73	535
	- Swasta	528	6.575	57.315
9	MTs			
	- Negeri	2	122	1.826
	- Swasta	165	3.548	24.851
10	MA			
	- Negeri	2	142	1.953
	- Swasta	72	1.741	11.658

Sumber : Kabupaten Lamongan Dalam Angka Tahun 2009

##### 2. Fasilitas Peribadatan

Fasilitas peribadatan yang dimiliki Kabupaten Lamongan sebagai berikut : Masjid sebanyak 1.684 unit, Mushola sebanyak 258 unit, langgar dan surau sebanyak 4.229 unit tersebar

disetiap kecamatan, gereja protestan sebanyak 8 unit terdapat di Kecamatan Ngimbang, Sambeng, kembangbahu, Babat, Lamongan, Karangbinangun, Turi; gereja katolik sebanyak 1 unit terdapat di Kec. Lamongan dan Pura sebanyak 1 unit terletak di Kec. Turi.

### 3. Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan yang dimiliki Kabupaten Lamongan antara lain : Rumah sakit sebanyak 5 unit terdapat di Kec. Babat 1 unit dan Kec. Lamongan 4 unit. Rumah bersalin sebanyak 10 unit, balai pengobatan sebanyak 40 unit, BKIA sebanyak 12 unit, puskesmas sebanyak 33 unit, puskesmas pembantu sebanyak 108 unit, apotik sebanyak 46 unit, tempat praktek dokter sebanyak 157 unit dan laboratorium medis sebanyak 3 unit

### 4. Fasilitas Perkantoran

Fasilitas perkantoran skala kabupaten terkonsentrasi di Kec. Lamongan sedangkan fasilitas perkantoran skala kecamatan tersebar di masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Lamongan

## 2.2.5. EKONOMI

Berdasarkan data BPS pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan Tahun 2010 sebesar 6,89%, Tahun 2011 sebesar 7,08%, Tahun 2012 sebesar 7,12%, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,03%. Dan pada Tahun 2012 perekonomian Kabupaten Lamongan mampu tumbuh sebesar 7,12%, yang didukung tiga sektor utama yaitu bangunan dan konstruksi dengan kontribusi 12,11%, perdagangan, Hotel dan restaurant dengan kontribusi 9,12%, dan sektor jasa dengan kontribusi sebesar 8,72%.

Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan sebesar 7,03% menjadi acuan pertumbuhan bagi kabupaten Lamongan. Bila ditinjau pada tingkat kesejahteraan rakyat yang diukur dengan PDRB perkapita, dari tahun 2010 terus mengalami peningkatan yang signifikan yaitu tahun 2010 PDRB perkapita rata-rata masyarakat Kabupaten Lamongan sebesar 9.986.061 rupiah dan pada Tahun 2011 mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 10.771.552,25 rupiah. Ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamongan semakin meningkat

## 2.2.6. SUMBER-SUMBER AIR DAN IRIGASI

Kabupaten Lamongan mempunyai luas baku sawah 46.035 Ha yang dialiri dari 52 Daerah Irigasi (DI), yang terdiri dari Sawah Teknis 14.924 Ha, Sawah ½ Teknis 10.551 Ha dan sawah sederhana 20.560 Ha. Dari jumlah 52 Daerah Irigasi tersebut sebagian besar airnya berasal dari waduk dan rawa. Waduk dan Rawa yang ada di kabupaten Lamongan banyak sekali jumlahnya yaitu 228 waduk dan rawa yang terdiri dari 184 waduk Desa (kecil) yang mengairi baku sawah sebesar 4.168 Ha dan 44 waduk dan rawa skala besar yang mengairi baku sawah sebesar 29.921 Ha. Di kabupaten Lamongan terdapat 42 Sungai termasuk sungai Bengawan Solo, dengan panjang total 603,00 Km. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8.  
Daerah Irigasi Dinas PU Pengairan Kabupaten Lamongan Tahun 2010

No	Nama Daerah Irigasi	Lokasi (kec)	Baku Sawah (Ha)			Jumlah (Ha)
			Teknis	½ Teknis	Sederhana	
<b>I</b>	<b>UPT Pengairan Sukodadi</b>					
1	Karangsambigalih	Sugio	164			164
2	Kalipang	Sugio	49			49
3	Sumberaji	Sukodado	523			523

4	Sukoharjo	Sugio	145			145	
5	Kedungdowo	Kb. bahu	340			340	
6	Doyomulyo I	Kb. Bahu	275			275	
7	Doyomulyo II	Kb. Bahu	178			178	
Sub Total Langsung Di Gondang							
8	Waduk Gorman	Sugio	740			740	
9	Wd. Bl gamngang	Sukodadi	2.111			2.111	
10	Waduk Gempol	Sukodadi	2.030			2.030	
Sub Total Suplesi Di Gondang							
11	Wd. Kedungdowo	Kb. bahu	16			16	
12	Wd. Lembeyan	Kb. bahu	20			20	
13	Beng. Jero Tinggi	Turi	334			334	
Sub Total							
Total UPT Sukodadi							
II	UPT Pengaturan Deket	Kb. bahu	43			43	
Sub Total Langsung Di Gondang							
2	Wd. Mojomaris	Kb. Bahu	386			386	
3	Waduk Lopang	Kb. bahu	325			325	
4	Waduk Rancang	Lamongan	1.352			1.352	
5	Waduk Joto	Tlung, Lamongan	1.351			1.351	
Sub Total Suplesi Di Gondang							
Sub Total							
6	Waduk Canggan	Sarirejo	358			358	
7	Waduk Takaran	Tlung	285			285	
8	Waduk Delikuno	Tlung	257			257	
9	Waduk Tuwin	Tlung	449			449	
10	Waduk Demo	Sarirejo	50			50	
11	Waduk Dukuh	Tlung	145			145	
12	Waduk Rando	Deket	1.045			1.045	
13	Waduk Semengko	Sarirejo	53			53	
Sub Total							
Sub Total							



4	Waduk Kalen	Kd. Pring	893		893
Sub Total DI Grijaten			4.513		4.513
5	Waduk Bowo	Modo, Baureno		670	670
6	Waduk Caling	Sugio		509	509
Sub Total				1.179	1.179
<b>Total UPT Kedungpring</b>			<b>4.513</b>	<b>1.818</b>	<b>6.331</b>
<b>VI UPT PENGAIRAN BABAT</b>					
1	Waduk Kuripan	Babat		202	202
2	Waduk Pading	Sukodadi		487	487
3	Waduk Maduran	Sekaran		225	225
4	Rawa Sogo	Babat			222
5	Rawa Semando	Babat			1.661
6	Rawa Manyar	Sekaran			860
7	Rawa Bulu	Sekaran			790
8	Rawa Cungkup	Sukodadi			1.274
9	Rawa Kwanon	Sukodadi			705
10	Sluis Keyongan	Babat		696	696

	<b>Total UPT Babat</b>			<b>1.610</b>	<b>5.512</b>	<b>7.122</b>
<b>VII</b>	<b>UPT PENGAIRAN LAREN</b>					
1	Wd. Makamsantri	Laren		302		302
2	Waduk Jajong	Laren		497		497
3	Wd. Sumurgung	Laren		123		123
4	Waduk Paprit	Laren		144		144
5	Rawa Jabung	Laren			2.143	3.143
	<b>Total UPT Laren</b>			<b>1.068</b>	<b>2.143</b>	<b>3.209</b>
	<b>TOTAL KABUPATEN LAMONGAN</b>		<b>14.924</b>	<b>10.551</b>	<b>20.560</b>	<b>46.035</b>

Sumber : Dinas Pengairan Lamongan



## Bab-3

# LANDASAN TEORI DAN METODOLOGI PENYUSUNAN

### 3.1. LANDASAN TEORI

Dalam penyusunan Identifikasi CSR di Kabupaten Lamongan, landasan teori, yang dipergunakan sebagai berikut :

#### 3.1.1. PENGERTIAN DAN TINJAUAN TEORI

##### A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Definisi Corporate Social Responsibility dalam bahasa Indonesia dikenal dengan tanggungjawab sosial perusahaan, sedangkan di Amerika, konsep ini seringkali disamakan dengan corporate citizenship. Pada intinya, keduanya dimaksudkan sebagai upaya perusahaan untuk meningkatkan kepedulian terhadap masalah sosial dan lingkungan dalam kegiatan usaha dan juga pada cara perusahaan berinteraksi dengan stakeholder yang dilakukan secara sukarela. Selain itu, tanggungjawab sosial perusahaan diartikan pula sebagai komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan dan masyarakat setempat (local) dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan.

Dalam berbagai wacana Corporate Social Responsibility dapat diartikan secara luas dan universal seperti berikut:

##### 1. World Business Council for Sustainable Development

Komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi, sambil meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya.

##### 2. International Finance Corporation

Komitmen dunia bisnis untuk memberi kontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui kerjasama dengan karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal dan masyarakat luas untuk meningkatkan kehidupan mereka melalui cara-cara yang baik bagi bisnis maupun pembangunan.

##### 3. Institute of Chartered Accountants, England, and Wales

Jaminan bahwa organisasi-organisasi pengelola bisnis mampu memberi dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan, sambil memaksimalkan nilai bagi para pemegang saham (shareholders) mereka.

##### 4. European Commission

Sebuah konsep dengan mana perusahaan mengintegrasikan perhatian terhadap sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksinya dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) berdasarkan prinsip kesukarelaan.

## 5. CSR Asia

Komitmen perusahaan untuk beroperasi secara berkelanjutan berdasarkan prinsip ekonomi, sosial dan lingkungan, seraya menyeimbangkan beragam kepentingan para stakeholders.

## 6. ISO 26000 mengenai Guidance on Social Responsibility

Tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat; mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan, dan norma-norma perilaku internasional; serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh.

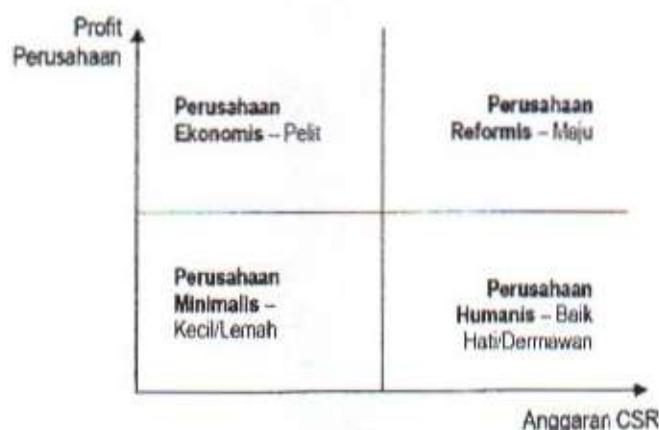
Pertanggungjawaban sosial perusahaan diungkapkan di dalam laporan yang disebut Sustainability Reporting. Sustainability Reporting adalah pelaporan mengenai kebijakan ekonomi, lingkungan dan sosial, pengaruh dan kinerja organisasi, dan produknya di dalam konteks pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Sustainability report harus menjadi dokumen strategik yang berlevel tinggi yang menempatkan isu, tantangan, dan peluang Sustainability Development yang membawanya menuju kepada core business dan sektor industrinya.

Dengan menggunakan dua pendekatan, sedikitnya ada delapan kategori perusahaan. Perusahaan ideal memiliki kategori reformis dan progresif. Dalam kenyataannya, kategori ini bisa saja saling bertautan.

### 1. Berdasarkan proporsi keuntungan perusahaan dan besarnya anggaran CSR:

- Perusahaan Minimalis. Perusahaan yang memiliki profit dan anggaran CSR yang rendah. Perusahaan kecil dan lemah biasanya termasuk kategori ini.
- Perusahaan Ekonomis. Perusahaan yang memiliki keuntungan tinggi, namun anggaran CSR mereka rendah. Perusahaan yang termasuk kategori ini adalah perusahaan besar, namun tidak mau mengeluarkan biaya untuk CSR.
- Perusahaan Humanis. Meskipun profit perusahaan rendah, proporsi anggaran CSR mereka relatif tinggi. Perusahaan pada kategori ini disebut perusahaan dermawan.
- Perusahaan Reformis. Perusahaan ini memiliki profit dan anggaran CSR yang tinggi. Perusahaan seperti ini memandang CSR bukan sebagai beban, melainkan sebagai peluang untuk lebih maju (Gambar 3.1).

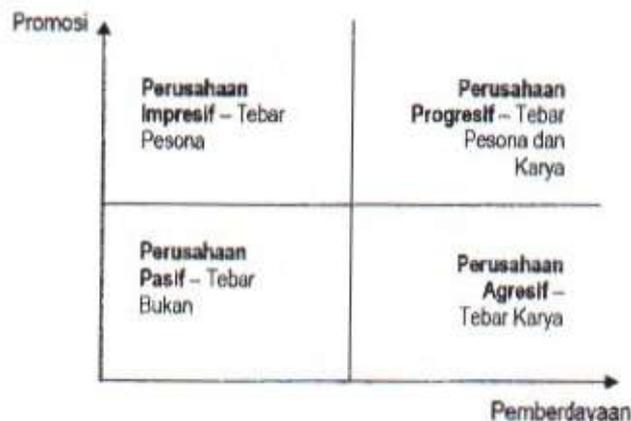
Gambar 3.1  
Kategori Perusahaan Berdasarkan Profit Perusahaan dan Anggaran CSR



## 2. Berdasarkan tujuan CSR: apakah untuk promosi atau pemberdayaan masyarakat:

- Perusahaan Pasif. Perusahaan yang menerapkan CSR tanpa tujuan jelas, bukan untuk promosi, bukan pula untuk pemberdayaan, sekadar melakukan kegiatan bersifat sosial. Perusahaan seperti ini melihat promosi dan CSR sebagai hal yang kurang bermanfaat bagi perusahaan.
- Perusahaan Impresif. CSR lebih diutamakan untuk promosi daripada untuk pemberdayaan. Perusahaan seperti ini lebih mementingkan "tebar pesona" daripada "tebar karya".
- Perusahaan Agresif. CSR lebih ditujukan untuk pemberdayaan daripada promosi. Perusahaan seperti ini lebih mementingkan karya nyata daripada tebar pesona.
- Perusahaan Progresif. Perusahaan menerapkan CSR untuk tujuan promosi dan sekaligus pemberdayaan. Promosi dan CSR dipandang sebagai kegiatan yang bermanfaat dan menunjang satu sama lain bagi kemajuan perusahaan (Gambar 2.2). (Suharto, 2008).

Gambar 2.2  
Kategori Perusahaan Berdasarkan Tujuan CSR



## B. KONSEP DAN PRINSIP CSR

Prinsip yang berkaitan erat dengan CSR adalah tanggungjawab yang merupakan aspek pertanggungjawaban dari setiap kegiatan perusahaan untuk melaksanakan prinsip corporate social responsibility. Oleh karena di dalam berusaha, sebuah perusahaan tidak akan lepas dari masyarakat sekitar, ditekankan juga pada pihak-pihak eksternal dimana perusahaan diharuskan memperhatikan kepentingan stakeholder perusahaan, menciptakan nilai tambah (value added) dari produk dan jasa, dan memelihara kesinambungan nilai tambah yang diciptakannya.

Diluar itu, lewat prinsip responsibility diharapkan membantu pemerintah dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesempatan kerja pada segmen masyarakat yang belum mendapatkan manfaat dari mekanisme pasar.

CSR sebagai sebuah gagasan, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggungjawab yang berpijak pada single bottom line yaitu nilai perusahaan (corporate value) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (financial) saja, tetapi harus berpijak pada triple bottom lines, dimana bottom lines selain financial juga adalah sosial dan lingkungan. Oleh karena kondisi keuangan saja tak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (sustainable).

Langkah yang tidak kalah pentingnya adalah membentuk departemen khusus tersendiri yang bertugas menjalankan konsep CSR sehingga upaya ini dapat dilakukan dengan fokus dan terarah, dan setidaknya terdapat prioritas di bidang kesehatan juga karena merupakan hal yang tidak dapat dikesampingkan, sehingga CSR tidak hanya sebatas konsep untuk mendapatkan kesan baik atau citra positif semata melainkan benar-benar merupakan realisasi dari niat baik perusahaan sebagai pasal dari masyarakat.

### C. AKTIVITAS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Berdasarkan standar dari Bank Dunia maka CSR meliputi beberapa komponen utama yakni (1) perlindungan lingkungan (2) jaminan kerja (3) hak asasi manusia (4) interaksi dan keterlibatan perusahaan dengan masyarakat (5) standar usaha (6) pasar (7) pengembangan ekonomi dan badan usaha (8) perlindungan kesehatan (9) kepemimpinan dan pendidikan (10) bantuan bencana kemanusiaan. Bagi perusahaan yang berupaya untuk membangun citra positif perusahaannya, maka kesepuluh komponen tersebut harus diupayakan pemenuhannya. Prince of Wales International Business Forum mengungkapkan bahwa ada 5 pilar aktivitas dari CSR (Ancok, 2005: 19-20):

#### 1. Buliding Human Capital

Secara internal, perusahaan dituntut untuk menciptakan SDM yang handal, secara eksternal perusahaan dituntut untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, biasanya melalui community development.

#### 2. Strengthening economies

Perusahaan dituntut untuk tidak menjadi kaya sendiri sementara komunitas di lingkungannya miskin, mereka harus memberdayakan ekonomi sekitar.

#### 3. Assesing Social Chesion

Perusahaan dituntut untuk menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitar agar tidak menimbulkan konflik.

#### 4. Encouraging Good Governance

Dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan harus menjalankan tata kelola bisnis dengan baik.

#### 5. Protecting The Environment

Perusahaan harus berupaya menjaga kelestarian lingkungan.

Dibawah ini kegiatan-kegiatan CSR sesuai dengan Triple bottom line, antara lain:

**Tabel 3.1**  
**Kegiatan CSR Triple Bottom Line**

No	Aspek	Muatan
1	Sosial	Pendidikan, pelatihan, kesehatan, perumahan
2	Ekonomi	Kewirausahaan, kelompok usaha bersama/unit mikro
3	Lingkungan	Penghijauan, reklamasi lahan, pengolahan, pelestarian

penguatan kelembagaan (secara internal, termasuk kesejahteraan karyawan) kesejahteraan sosial, olahraga, pemuda, wanita, agama, kebudayaan dan sebagainya.

### D. KEUNTUNGAN PENERAPAN CSR BAGI PERUSAHAAN

Gurvy Kavey mengungkapkan 5 manfaat utama CSR bagi perusahaan (Ancok, 2005: 24):

1. Profitabilitas dan kinerja financial yang lebih kokoh misalnya lewat efisiensi lingkungan
2. Meningkatkan akuntabilitas dan assessment dari komunitas investasi.
3. Mendorong komitmen karyawan karena mereka diperhatikan dan dihargai.
4. Menurunkan kerentanan gejolak dengan komunitas.
5. Mempertinggi reputasi dan corporate branding.

Manfaat tersebut antara lain dapat meningkatkan penjualan dan saham di pasaran, menguatkan posisi merk, meningkatkan citra dan pengaruh perusahaan, meningkatkan kemampuan untuk menarik, memotivasi, dan menahan karyawan, mengurangi pengeluaran operasional, dan meningkatkan daya penarik investor dan para analisis keuangan.

Pernyataan Kavey terutama dalam hal reputasi dan corporate branding selaras dengan hasil riset SWA yang menyatakan bahwa manfaat pelaksanaan program CSR bagi perusahaan yaitu: (Ancok, 2005: 24-25)

- a. Memelihara dan meningkatkan citra perusahaan,
- b. Hubungan baik dengan masyarakat
- c. Mendukung operasional perusahaan
- d. Sarana akulturasi perusahaan dengan karyawan
- e. Memperoleh bahan baku dan alat-alat untuk produksi perusahaan
- f. Mengurangi gangguan masyarakat pada operasional perusahaan.

Keputusan manajemen perusahaan untuk melaksanakan program-program CSR secara berkelanjutan, pada dasarnya merupakan keputusan yang rasional. Sebab implementasi program-program CSR akan menimbulkan efek lingkaran emas yang akan dinikmati oleh perusahaan dan seluruh stakeholdernya. Melalui CSR, kesejahteraan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat lokal maupun masyarakat luas akan lebih terjamin. Kondisi ini pada gilirannya akan menjamin kelancaran seluruh proses atau aktivitas produksi perusahaan serta pemasaran hasil-hasil produksi perusahaan. Sedangkan terjaganya kelestarian lingkungan dan alam selain menjamin kelancaran proses produksi juga menjamin ketersediaan pasokan bahan baku produksi yang diambil dari alam.

Kesejahteraan masyarakat akan mendorong peningkatan daya beli sehingga memperkuat daya serap pasar terhadap output perusahaan. Sedangkan kelestarian faktor-faktor produksi serta kelancaran proses produksi yang terjaga akan meningkatkan efisiensi proses produksi. Dua faktor tersebut akan meningkatkan potensi peningkatan laba perusahaan. Kemampuan perusahaan dengan sendirinya akan meningkat jika mengalokasikan sebagian dari keuntungannya untuk membiayai berbagai aktivitas CSR di tahun-tahun berikutnya.

Manfaat penerapan CSR yang dilaksanakan dengan berlandaskan pada nilai-nilai etis telah banyak dinikmati oleh berbagai perusahaan multinasional dari negara-negara Eropa. Kesediaan perusahaan-perusahaan multinasional dari Eropa untuk menerapkan CSR atas inisiatif sendiri telah membantu menciptakan diferensiasi pasar atas para pesaing mereka dari Jepang maupun AS. Selain itu juga menunjang upaya perusahaan dalam mengelola tenaga kerja, menjaga kesetiaan konsumen, mewujudkan kekuatan merek, mengurangi biaya-biaya menjadi lebih rendah, menekan risiko sosial dan bisnis, serta membangun kredibilitas usaha di mata publik maupun investor saham.

Karena itu para eksekutif perusahaan multinasional di Eropa semakin yakin bahwa perusahaan yang memiliki kinerja sosial dan lingkungan yang semakin kuat akan mampu meraih kinerja yang lebih baik dibandingkan perusahaan yang tidak memiliki kepedulian atas tanggungjawab sosialnya. Adidas, Nestle, dan Volkswagen hanya merupakan sedikit contoh perusahaan multinasional dari Eropa yang berhasil memanfaatkan CSR untuk pengembangan jaringan bisnisnya.

Hal ini sejalan dengan penelitian di Bursa Efek Indonesia terhadap emiten-emiten yang melaksanakan program-program CSR menunjukkan, kegiatan CSR ternyata berbanding positif terhadap kinerja perusahaan dan imbal hasil saham. Oleh karena CSR terdiri dari rangkaian program yang memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder perusahaan dalam jangka panjang, dengan demikian CSR tidak dapat dipandang sebagai beban sosial melainkan justru menjadi investasi sosial perusahaan.

Sebab dalam jangka panjang manfaat positif dari program CSR yang berkelanjutan akan menunjang aktivitas bisnis perusahaan. Manfaat jangka panjang ini meningkatkan keyakinan para investor di bursa efek atas prospek perusahaan di masa mendatang. Prospek yang positif dengan sendirinya meningkatkan kemungkinan dan peluang naiknya nilai investasi di bursa efek yang dilakukan saat ini.

Paparan diatas menunjukkan bahwa banyaknya keuntungan positif yang dapat diterima baik oleh perusahaan maupun dengan para stakeholder begitu juga dengan alam. Manfaat dari dilaksanakannya CSR dapat membuat semua makhluk dapat ikut berperan untuk menjaga bumi, Tuhan menganugerahkan bumi beserta isinya untuk dirawat dan dilestarikan. Maka dari itu setiap

aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan haruslah tetap menjaga keadaan lingkungan dan sosial disekitarnya, bukan hanya berfokus pada mencari keuntungan. Melalui kegiatan CSR, perusahaan juga dapat meningkatkan profitabilitas yang ingin dicapai.

## **E. TAHAPAN CSR**

Menurut Wibisono (2007), terdapat empat tahapan CSR, yaitu:

### **1. Tahap perencanaan**

Tahap ini terdiri dari tiga langkah utama, yaitu Awareness Building, CSR Assessment, dan CSR Manual Building. Awareness Building merupakan langkah utama membangun kesadaran pentingnya CSR dan komitmen manajemen, upaya ini dapat berupa seminar, lokakarya, dan lain-lain. CSR Assessment merupakan upaya memetakan kondisi perusahaan dan mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu mendapatkan prioritas perhatian dan langkah-langkah yang tepat untuk membangun struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan CSR secara efektif. Langkah selanjutnya membangun CSR Manual Building dapat melalui benchmarking, menggali dari referensi atau meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Pedoman ini diharapkan mampu memberikan kejelasan dan keseragaman pola pikir dan pola tindak seluruh elemen perusahaan guna tercapainya pelaksanaan program yang terpadu, efektif, dan efisien.

### **2. Tahap implementasi**

Pada tahap ini terdapat beberapa poin yang penting diperhatikan, yaitu pengorganisasian (organizing) sumber daya, penyusunan (staffing), pengarahan (direction), pengawasan atau koreksi (controlling), pelaksanaan sesuai rencana, dan penilaian (evaluation) tingkat pencapaian tujuan. Tahap implementasi terdiri dari tiga langkah utama, yaitu sosialisasi, pelaksanaan, dan internalisasi.

### **3. Tahap evaluasi**

Tahap evaluasi perlu dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan CSR.

### **4. Pelaporan**

Pelaporan diperlukan dalam rangka membangun sistem informasi baik untuk keperluan pengambilan keputusan maupun keperluan keterbukaan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

## **F. IMPLEMENTASI CSR**

Implementasi CSR di perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi tersebut diantaranya adalah komitmen pimpinannya, ukuran atau kematangan perusahaan, regulasi atau sistem perpajakan yang diatur pemerintah dan sebagainya (Wibisono, 2007). Merujuk pada (Saidi dan abidin, 2004) ada empat model atau pola CSR yang umumnya diterapkan oleh perusahaan di Indonesia, yaitu:

1. Keterlibatan langsung. Perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. Untuk menjalankan tugas ini, sebuah perusahaan biasanya menugaskan salah satu pejabat seniornya, seperti corporate secretary atau public affair manager atau menjadi bagian dari tugas pejabat public relation.
2. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan. Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau grupnya. Model ini merupakan adopsi dari model yang lazim diterapkan di perusahaan-perusahaan di negara maju. Biasanya, perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin atau dana abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan. Beberapa yayasan yang didirikan perusahaan diantaranya adalah Yayasan Coca Cola Company, Yayasan Rio Tinto (perusahaan pertambangan), Yayasan Dharma Bhakti Astra.
3. Bermitra dengan pihak lain. Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan lembaga sosial/organisasi non-pemerintah (NGO/LSM), instansi pemerintah, universitas atau

media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya. Beberapa lembaga sosial atau organisasi non-pemerintah yang bekerjasama dengan perusahaan dalam menjalankan CSR antara lain adalah Palang Merah Indonesia (PMI), Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI), Dompot Dhuafa, instansi pemerintah (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI, Depdiknas, Depkes, Depsos), universitas (UI, ITB, IPB), media massa (DKK Kompas, Kita Peduli Indosiar).

4. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium. Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Dibandingkan dengan model lainnya, pola ini lebih berorientasi pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat "hibah pembangunan". Pihak konsorsium atau lembaga semacam itu yang dipercaya oleh perusahaan-perusahaan yang mendukungnya secara pro aktif mencari mitra kerjasama dari kalangan lembaga operasional dan kemudian mengembangkan program yang disepakati bersama.

Kehidupan masyarakat yang sejahtera merupakan kondisi yang ideal dan menjadi dambaan setiap warga masyarakat. Oleh sebab itu, wajar apabila berbagai upaya dilakukan untuk mewujudkan kondisi tersebut. Di samping itu berbagai upaya juga dilakukan untuk menghilangkan atau minimal mengantisipasi dan mengeliminasi faktor-faktor yang menghalangi pencapaian tersebut seperti masalah-masalah internal dan eksternal yang dapat mengakibatkan konflik.

Realitas yang tidak diharapkan kemudian mendorong dilakukannya perubahan dan perbaikan. Hal itu disebabkan karena dalam kehidupan masyarakat tidak pernah dijumpai kondisi sejahtera yang absolut dimana setiap kebutuhan masyarakat terpenuhi. Setiap masyarakat berperilaku sesuai nilai dan norma yang telah disepakati dan setiap bagian dari sistem sosial menjalankan fungsi sebagaimana diharapkan.

## **G. PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL**

Menurut Martin Freedman, dalam Henry dan Murtanto (2001) dalam Kuntari dan Sulistyani (2007), ada tiga pendekatan dalam pelaporan kinerja sosial, yaitu :

### **1. Pemeriksaan Sosial (Social Audit)**

Pemeriksaan sosial mengukur dan melaporkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan dari program-program yang berorientasi sosial dari operasi-operasi yang dilakukan perusahaan. Pemeriksaan sosial dilakukan dengan membuat suatu daftar aktivitas-aktivitas perusahaan yang memiliki konsekuensi sosial, lalu auditor sosial akan mencoba mengestimasi dan mengukur dampak-dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas-aktivitas tersebut.

### **2. Laporan Sosial (Social Report)**

Berbagai alternatif format laporan untuk menyajikan laporan sosial telah diajukan oleh para akademis dan praktisioner. Pendekatan-pendekatan yang dapat dipakai oleh perusahaan untuk melaporkan aktivitas-aktivitas pertanggungjawaban sosialnya ini dirangkum oleh Dillely dan Weygandt menjadi empat kelompok sebagai berikut (Henry dan Murtanto, 2001 dalam Kuntari dan Sulistyani, 2007) :

#### **a. Inventory Approach**

Perusahaan mengkompilasikan dan mengungkapkan sebuah daftar yang komprehensif dari aktivitas-aktivitas sosial perusahaan. Daftar ini harus memuat semua aktivitas sosial perusahaan baik yang bersifat positif maupun negatif.

#### **b. Cost Approach**

Perusahaan membuat daftar aktivitas-aktivitas sosial perusahaan dan mengungkapkan jumlah pengeluaran pada masing-masing aktivitas tersebut.

#### **c. Program Management Approach**

Perusahaan tidak hanya mengungkapkan aktivitas-aktivitas pertanggungjawaban sosial tetapi juga tujuan dari aktivitas tersebut serta hasil yang telah dicapai oleh perusahaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan itu.

#### d. Cost Benefit Approach

Perusahaan mengungkapkan aktivitas yang memiliki dampak sosial serta biaya dan manfaat dari aktivitas tersebut. Kesulitan dalam penggunaan pendekatan ini adalah adanya kesulitan dalam mengukur biaya dan manfaat sosial yang diakibatkan oleh perusahaan terhadap masyarakat.

### 3. Pengungkapan Sosial dalam Laporan Tahunan (Disclosure In Annual Report)

Pengungkapan sosial adalah pengungkapan informasi tentang aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan sosial perusahaan. Pengungkapan sosial dapat dilakukan melalui berbagai media antara lain laporan tahunan, laporan interim/laporan sementara, prospektus, pengumuman kepada bursa efek atau melalui media masa. Perusahaan cenderung untuk mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan aktivitasnya dan dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan tersebut.

## H. REWARD BAGI KORPORAT YANG MELAKSANAKAN CSR

### 1. Reward Financial Bagi Perusahaan

#### a. Menurunkan biaya operasional perusahaan

Perusahaan sebagai organisasi bisnis dalam skema operasionalnya membutuhkan energi dan sumber daya lainnya, hal itu mampu menyedot biaya yang sangat besar sekali apabila tidak disiasati dengan cermat. CSR adalah suatu inisiatif yang harus dilakukan perusahaan untuk menekan biaya operasional bisnis tersebut

- Meningkatkan volume penjualan dan pangsa pasar
- Menarik calon investor
- Pertumbuhan nilai pasar yang signifikan
- Membuat kesejahteraan karyawan lebih baik
- Mencegah resiko dari dampak sosial
- Mencegah risiko dari dampak alam
- Reward non finansial bagi perusahaan

Reward non financial cenderung adanya pergerakan CSR dari suatu perusahaan yang menghasilkan, tidak berbentuk uang tetapi berbentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas perusahaan tersebut secara kualitatif, hal ini tentu sangat menguntungkan bagi perusahaan itu sendiri. Inti reward dari pelaksanaan CSR yang bersifat non financial bagi perusahaan adalah "memperkuat reputasi perusahaan".

Ada 5 elemen yang membantu proses "memperkuat reputasi perusahaan" yakni:

- Kepercayaan
- Kredibilitas
- Responsibility
- Akuntabilitas
- Mengelola risiko bisnis secara lebih tanggap dan terperinci.

### 3.1.2. CSR BIDANG LINGKUNGAN

Definisi operasional CSR yang digunakan adalah tindakan yang melampaui kepatuhan kepada segala hukum dan peraturan yang berkaitan dengan bidang usaha perusahaan, untuk:

1. Berkomitmen pada perilaku bisnis yang etis untuk meningkatkan kualitas hidup dari para pemangku kepentingan.

2. Berkontribusi pada keberlanjutan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial sebagai bagian dari proses pembangunan berkelanjutan

CSR menurut World Business Council For Sustainable Development (WBCSD) merupakan suatu komitmen berkelanjutan dari dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi pada komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup karyawan beserta seluruh keluarganya.

Menurut ISO 26000 Karakteristik dari Social Responsibility adalah kemauan sebuah organisasi untuk mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan dalam pengambilan keputusan dan bertanggung jawab atas dampak dari keputusan serta aktivitas yang mempengaruhi masyarakat dan lingkungan.

Dalam ISO 26000 Social Responsibility mencakup 7 aspek utama, yaitu: tata kelola organisasi, hak asasi manusia, ketenagakerjaan, lingkungan, praktek bisnis yang adil, isu konsumen serta keterlibatan dan pengembangan masyarakat.

Dalam Global Impact terdapat 10 prinsip utama dari 4 aspek bisnis yang bertanggung jawab sosial dan berkelanjutan, yaitu:

### **Hak Asasi Manusia**

#### **Prinsip 1**

Pelaku bisnis harus mendukung dan menghormati perlindungan terhadap hak asasi manusia yang diakui secara internasional.

#### **Prinsip 2**

Memastikan perusahaannya tidak terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia.

### **Ketenagakerjaan**

#### **Prinsip 3**

Pelaku bisnis harus menjunjung tinggi kebebasan para karyawannya untuk berserikat dan mengadakan perundingan.

#### **Prinsip 4**

Menghapus segala bentuk kerja paksa dan kerja wajib

#### **Prinsip 5**

Menghapus adanya pekerja anak secara efektif

#### **Prinsip 6**

Menghapus diskriminasi yang terjadi pada pekerjaan dan jabatan

### **Lingkungan**

#### **Prinsip 7**

Pelaku bisnis harus mendukung tindakan pencegahan terhadap pengrusakan lingkungan.

#### **Prinsip 8**

Memiliki inisiatif dalam mempromosikan tanggung jawab lingkungan.

#### **Prinsip 9**

Mendorong pengembangan dan penyebaran teknologi yang ramah lingkungan.

### **Anti Korupsi**

#### **Prinsip 10**

Pelaku bisnis harus melawan korupsi dalam segala bentuk, termasuk pemerasan dan penyuapan.

Dari penelitian yang dilakukan oleh CECT di Indonesia, CSR memiliki beberapa tingkatan berdasarkan ruang lingkup dan kompleksitasnya, yaitu :

1. Kepatuhan terhadap semua hukum yang ada
2. CSR dalam bentuk Filantropi
3. CSR dalam bentuk Community Development
4. CSR dimana perusahaan mengandung dampak negatif yang timbul dari bisnisnya dan meningkatkan dampak positif bisnisnya.
5. CSR sebagai suatu sistem yang terintegrasi dalam perencanaan bisnis perusahaan (Radyati, 2010)

Berdasarkan tingkatan tersebut, perusahaan sangat dianjurkan melakukan kegiatan CSR yang melampaui kepatuhan terhadap semua hukum (beyond compliance).

Dalam melaksanakan kegiatan CSR sangat dianjurkan perusahaan melibatkan komunitas setempat, sehingga kegiatan CSR tersebut menghasilkan dampak positif tidak hanya untuk internal tetapi juga eksternal perusahaan. Kegiatan perlibatan langsung komunitas di wilayah perusahaan berada selama ini dikenal dengan nama CD atau Comdev.

### **HUBUNGAN CD, TJSL DAN CSR**

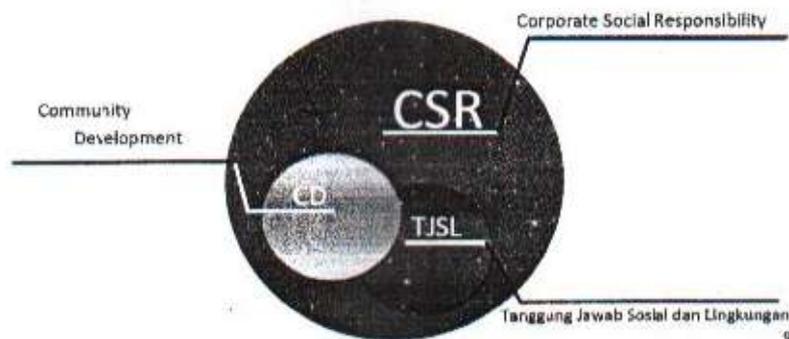
Community Development (CD) atau yang dikenal sebagai Comdev atau pengembangan masyarakat merupakan suatu proses yang dirancang untuk menciptakan kemajuan kondisi ekonomi dan sosial warga masyarakat melalui partisipasi aktif, dimana pada akhirnya akan menumbuhkan prakarsa dan kemandirian masyarakat itu sendiri.

Konsep CSR erat kaitannya dengan konsep pengembangan masyarakat atau community development (Comdev), dimana Comdev merupakan bagian penting dalam proses implementasi kegiatan CSR. Sementara Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL), sebagaimana termaktub dalam Pasal 74 UU No. 40/2007 tentang perseroan Terbatas merupakan kepatuhan perusahaan kepada peraturan sektoral yang sudah ada.

TJSL bersifat wajib dimana dalam pelaksanaannya, perusaah harus mengacu kepada semua peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup, antara lain UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH); UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, PP No. 82/2001 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Setelah perusahaan melaksanakan seluruh TJSLnya; dengan mematuhi segala hukum dan peraturan yang berlaku terkait dengan jenis usaha perusahaan tersebut, KLH sebagai institusi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan, akan terus mendorong perusahaan tersebut untuk melaksanakan kegiatan CSR bidang lingkungan.

Apabila dijabarkan dalam sebuah gambar, hubungan antara CD, TJSL, dan CSR dapat dipetakan sebagai berikut:



## **ALTERNATIF BIDANG KEGIATAN CSR**

Dalam merencanakan kegiatan CSR bidang Lingkungan, perusahaan dapat memilih beberapa bidang kegiatan CSR sebagai berikut:

1. CLEANER PRODUCTION (PRODUKSI BERSIH)
2. ECO OFFICE (KANTOR RAMAH LINGKUNGAN)
3. KONSERVASI ENERGI DAN SUMBER DAYA ALAM
4. PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI 3R
5. RENEWABLE ENERGY (ENERGI TERBARUKAN)
6. ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM
7. PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP

Berikut adalah penjabaran singkat contoh dari masing-masing bidang kegiatan CSR. Namun demikian tidak menutup kemungkinan bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan CSR bidang lingkungan di luar bidang yang disebutkan di atas.

### **1. PRODUKSI BERSIH**

Fokus kegiatan produksi bersih adalah efisiensi penggunaan sumber daya, seperti :

- Penghematan dan peningkatan produktivitas
- Penurunan jumlah sampah, limbah dan emisi
- Penurunan eksploitasi penggunaan

Pelaksanaan produksi bersih selain dapat dilakukan secara internal, juga dapat dilakukan misalkan dengan cara membantu UKM (Usaha Kecil Menengah) menerapkan produksi bersih dalam kegiatan usahanya

Upaya produksi bersih secara garis besar terdiri atas :

- a. Efisiensi penggunaan bahan baku dan bahan pembantu

Contohnya antara lain :

Efisiensi penggunaan pulp di pembuatan kertas, efisiensi penggunaan karet mentah dalam pembuatan ban dan efisiensi penggunaan zat pewarna dalam proses penawaran tekstil.

Indikator hasil terukur:

- Jumlah bahan baku terpakai/unit produk (m<sup>3</sup> kayu/ton pulp)
- Jumlah limbah/unit bahan baku terpakai (ton sisa kayu/m<sup>3</sup> kayu)

- b. Efisiensi air

Contohnya antara lain:

Efisiensi penggunaan air di proses penawaran tekstil, efisiensi penggunaan air di proses penyamakan kulit dan upaya pemanfaatan kembali air limbah.

Indikator hasil terukur:

- Volume air terpakai/jumlah produk (m<sup>3</sup> air/yard kain)
- Volume limbah cair/jumlah produk (m<sup>3</sup> air/yard kain)
- Persentase volume air ter-daur ulang (recycle) / volume air terpakai (%)
- Persentase volume air ter-daur ulang (recycle) / volume air limbah (%)

- c. Efisiensi energi

Contohnya antara lain:

Efisiensi pembakaran di klin semen, efisiensi penggunaan bahan bakar di boiler, penghematan listrik melalui penggunaan lampu hemat energi, dan co-generation.

Indikator hasil terukur:

- Konsumsi energi/unit produk (Kwh/ton produk atau m<sup>3</sup> gas/1000 produk atau liter solar/m<sup>3</sup> produk)
- Efisiensi energi/unit produk (Kwh/ton produk atau m<sup>3</sup> gas/1000 produk atau liter solar/m<sup>3</sup> produk)
- Persentasi efisiensi energi/ total konsumsi energi sebelum upaya efisiensi (%)

d. Upaya pengelolaan limbah di dalam perusahaan

Upaya pengelolaan limbah dapat dilakukan dengan:

- Pemilahan limbah berdasarkan kategori tertentu.

Contohnya antara lain pemilahan limbah organik dan non organik

- Pengurangan limbah

Contohnya antara lain pengurangan jumlah scrap baja di pabrik besi baja, recycle zat warna sisa di industri textile, dan recovery solvent dari limbah cair

Indikator hasil terukur:

- Jumlah limbah ter-daur ulang (m<sup>3</sup> atau ton atau satuan)
- Persentase limbah ter-daur ulang/jumlah total limbah (%)
- Persentase penurunan limbah / jumlah total limbah (%)
- Jumlah penurunan limbah (m<sup>3</sup> atau ton atau satuan)
- Jumlah limbah ter-recovery (m<sup>3</sup> atau ton atau satuan)
- Persentase limbah ter-recovery/jumlah total limbah (%)

Penerapan produksi bersih harus di tekankan pada sustainability (keberlanjutan) sehingga tidak hanya bersifat sporadis dan sementara. Untuk itu proses penerapan produksi bersih harus meliputi :

1. Komitmen Manajemen Puncak

- Tersedianya objektivitas dan target terkait produksi bersih di perusahaan.
- Tersedianya sumber daya manusia yang bertanggung jawab atas pelaksanaan upaya produksi bersih (team produksi bersih atau penanggung jawab produksi bersih)

2. Perencanaan

- Tersedianya program untuk mencapai objective dan target produksi bersih.

3. Pelaksanaan dan Pelaporan

- Tersedianya laporan secara periodik mengenai pelaksanaan dan pencapaian penerapan produksi bersih di perusahaan.

4. Standarisasi atau Pembakuan

- Tersedianya standard baru atau metode baru atau prosedur baru sebagai pembakuan untuk menjamin upaya penerapan produksi bersih yang sudah berhasil dilakukan, berjalan secara kontinyu.
- Tersedianya pelaporan dan pemantauan secara berkala tentang hasil penerapan produksi bersih setelah pembakuan.

## **2. ECO OFFICE (KANTOR RAMAH LINGKUNGAN)**

Dengan mengadopsi konsep Kantor Ramah Lingkungan dapat tercapai efisiensi biaya, peningkatan produktivitas kerja dan tercipta lingkungan kantor yang bersih, sehat, aman dan nyaman.

Kantor Ramah Lingkungan memiliki 3 ruang lingkup, yaitu:

- Perlengkapan dan peralatan kantor
- Energi dan Air
- Pengolahan sampah

Beberapa kegiatan Kantor Ramah Lingkungan yang dapat dilaksanakan oleh perusahaan dalam kegiatan CSR adalah sebagai berikut:

- a. Mengimplementasikan desain gedung green building dengan menggunakan passive solar energy dalam lingkungan kerja, misalkan dengan mengubah atap gedung menjadi green roof, dengan memberikan tanaman atau taman di atap gedung dan menggunakan lantai yang eco-friendly seperti lantai dan bahan serat bambu.
- b. Melakukan penghematan kertas, seperti; menggunakan kertas pada kedua sisinya dan menggunakan standard kertas 70 gram.
- c. Menggunakan alat elektronik yang hemat listrik dan air.
- d. Memasang dan menggunakan toilet dengan aliran kecil
- e. Mendukung penggunaan teknologi yang paling tepat dalam melakukan pengelolaan lingkungan, seperti sumur resapan, alat penakar hujan, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
- f. Meningkatkan estetika lingkungan (landscape).
- g. Mendukung program ekolabel, pengadaan barang dan jasa berbasis lingkungan (green procurement) dalam pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor
- h. Menanam tanaman yang tidak memerlukan penyiraman terlalu sering.
- i. Memilah sampah dan mendaur ulang kertas bekas pakai.

Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan Kantor Ramah Lingkungan, antara lain:

- Berkurangnya tagihan air dan listrik
- Berkurangnya total penggunaan listrik (kWh)
- Berkurangnya total penggunaan kertas (kg)
- Berkurangnya total sampah yang dihasilkan (kg)

Untuk pelaksanaan Kantor Ramah Lingkungan dapat mengacu pada dokumen pengembangan Pelaksanaan Eco Office Kementerian Lingkungan Hidup, yang dikeluarkan pada bulan Mei 2009.

## **3. KONSERVASI ENERGI DAN SUMBER DAYA ALAM (SDA)**

Konservasi energi dan SDA adalah suatu usaha dan kegiatan mengurangi penggunaan energi dan SDA atau terpeliharanya keanekaragaman hayati baik yang dilakukan oleh kegiatan yang memproduksi barang maupun jasa.

Konservasi energi dan SDA dapat mengurangi proses eksplorasi dan eksploitasi SDA berupa bahan bakar, bahan tambang mineral dan bahan kimia B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang saat ini jumlahnya semakin terbatas. Selain itu konservasi energi dan SDA juga dapat meningkatkan keanekaragaman hayati yang dapat memberi pengaruh positif terhadap ekosistem sehingga dapat mencegah bencana alam.

Kegiatan CSR yang dilakukan dengan konsep Konservasi energi dan SDA dimulai dari identifikasi peluang penerapan dan pengembangan metode ini.

Misalnya dalam penggunaan listrik dan bahan kimia, perusahaan melakukan perhitungan atau pendataan awal terhadap jumlah pemakaiannya. Kemudian menentukan upaya tertentu misalnya mengganti alat kerja yang membutuhkan energi, bahan kimia dan air yang lebih sedikit, sehingga dengan penggantian alat kerja tersebut didapat pengurangan penggunaan energi, bahan kimia dan atau air.

Dengan memperhatikan kondisi lingkungan di sekitar kegiatan/usaha dijalankan, dapat dicari peluang untuk memperkaya keanekaragaman hayati di alam, baik melakukan penghijauan (penanaman pohon), pembudidayaan terumbu karang, penangkaran hewan langka yang melibatkan masyarakat sekitar sebagai mitra dalam menjalankan perlindungan alam ini.

Beberapa kegiatan Konservasi Energi dan SDA yang dapat dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka CSR adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan kegiatan/upaya penghematan dalam menggunakan energi dan bahan bakar sehingga dapat mengurangi timbulnya Gas Rumah Kaca.
- b. Melakukan kegiatan/upaya penghematan dalam menggunakan air untuk kebutuhan domestik seperti MCK (Mandi Cuci Kakus), termasuk melakukan penggunaan kembali (reuse) dan daur ulang (recycle) terhadap limbah cair domestik sehingga terdapat penurunan jumlah pemakaian air baku.
- c. Melakukan kegiatan/upaya pengurangan (efisiensi) bahan baku (SDA) sehingga terdapat penurunan penggunaan bahan baku.
- d. Melakukan kegiatan/upaya mengganti bahan baku yang tidak ramah lingkungan Menjadi bahan Ramah Lingkungan
- e. Melakukan kegiatan/upaya dan aktivitas yang terkait dengan keanekaragaman hayati seperti melakukan pencatatan atas jenis biodiversity (Tanaman dan seluruh jenis binatang termasuk serangga) sebelum dan sesudah dilaksanakan kegiatan perusahaan; kegiatan penghijauan, penangkaran fauna, perlindungan flora, budidaya terumbu karang sehingga dapat mempertahankan dan atau meningkatkan jumlah keanekaragaman hayati.
- f. Melakukan pendampingan masyarakat sebagai upaya menjaga zona perlindungan hutan.
- g. Melakukan pemberdayaan masyarakat desa hutan berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan dan lingkungan.
- h. Membuat taman keanekaragaman hayati
- i. Melakukan perlindungan satwa dan puspa bersama masyarakat, pelestarian penyu dan rehabilitasi dan konservasi terumbu karang
- j. Melakukan pembuatan sumur resapan dan penampungan air hujan
- k. Melakukan pelatihan pembibitan tanaman bersama masyarakat.

#### **4. PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI 3R**

Menurut Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah:

- Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
- Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Keberadaan sampah dalam jumlah yang banyak jika tidak dikelola secara baik dan benar akan menimbulkan gangguan dan dampak terhadap lingkungan. Salah satu solusi pengelolaan sampah, sebagaimana termaktub dalam UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah penerapan sistem 3R atau reuse, reduce, dan recycle (3R). Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Recycle berarti mengolah kembali (daur ulang) sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat.

Beberapa kegiatan pengelolaan sampah melalui 3R yang dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan identifikasi jenis sampah yang ada di sekitar usaha perusahaan yang mencakup dari sumber sampah, sifat sampah dan bentuk sampah.
- b. Melakukan identifikasi sampah yang dihasilkan dari eksternalitas perusahaan.
- c. Menyusun program pengelolaan sampah yang mengadopsi jenis sampah, eksternalitas perusahaan, prinsip 3R dan konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- d. Mengembangkan program pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan nilai ekonomis sampah.
- e. Melaksanakan community based waste management, seperti pemilihan sampah bersama masyarakat dan pembuatan kompos bersama atau oleh masyarakat.
- f. Melakukan pengembangan produk masyarakat menggunakan konsep 3R.

Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan pengelolaan sampah melalui 3R adalah :

- Volume sampah yang dibuang ke TPA berkurang
- Sampah memiliki nilai ekonomis yang memberi kesempatan usaha bagi masyarakat
- Berkembangnya usaha mandiri berbasis daur ulang sampah

#### **5. ENERGI TERBARUKAN (RENEWABLE ENERGY)**

Energi terbarukan adalah energi yang diperoleh dari sumber yang dapat diperbaharui yang tersedia di alam, seperti sinar matahari, angin, air dan geothermal. Kegiatan Energi Terbarukan yang dapat dilaksanakan oleh perusahaan adalah:

- Menggunakan sumber energi terbarukan dalam proses produksi, seperti Micro Hydro, Solar Cell, Turbin Angin, Biogas, Biodiesel, dan etanol.
- Membangun dan menyediakan sarana/infra struktur energi terbarukan bagi masyarakat.
- Melakukan penelitian-penelitian yang terkait dengan pengembangan Energi Terbaru.
- Melakukan konversi limbah biologi menjadi sumber energi terbarukan
- Memelihara ketersediaan energi dan meningkatkan kualitas dan keanekaragamannya.
- Melakukan upaya pengembangan energi alternatif bersama masyarakat

Kegiatan CSR yang dilakukan dengan konsep Energi Terbarukan merupakan suatu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap alam dan lingkungan hidup, karena kegiatan ini mengurangi proses eksplorasi dan eksploitasi Sumber Energi Fossil yang saat ini jumlahnya semakin terbatas. Energi Terbarukan juga dapat mengurangi dan mencegah meningkatnya emisi penyebab gas rumah kaca yang dapat mempengaruhi perubahan iklim global.

Kegiatan CSR bicang lingkungan dengan konsep energi terbarukan dimulai dari identifikasi peluang pengembangan atau penelitian energi tersebut. Sebagai contoh suatu perusahaan yang berada di daerah yang jauh dari penduduk. Perusahaan tersebut memiliki konsumen yang tinggal disuatu daerah dekat dengan laut (nelayan) dengan kondisi kekurangan energi atau belum mendapat jaringan listrik. Akan tetapi daerah tersebut memiliki kecepatan angin cukup besar yang potensial untuk dikembangkan sebagai tenaga listrik. Dengan demikian maka perusahaan dapat mengembangkan energi angin di daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan listrik. Penggunaan energi angin juga tidak menimbulkan emisi CO<sub>2</sub> dan dalam jangka panjang dapat mengurangi kegiatan penambangan menggunakan bahan tambang dalam operasionalnya.

## 6. ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM

Perubahan iklim merupakan isu yang sangat erat dengan lingkungan. Perubahan iklim terjadi akibat pemanasan global, dimana dampak negatif yang ditimbulkannya antara lain; terjadinya anomali cuaca yang berdampak pada kekeringan, curah hujan yang sangat tinggi, perubahan musim tanam dan angin ribut serta terjadinya kenaikan muka air laut yang berdampak pada intrusi air laut, rob, dan banjir atau genangan air laut sehingga meningkatkan angka kejadian penyakit menular melalui vektor nyamuk.

Salah satu upaya untuk mengatasi dampak negatif perubahan iklim adalah melalui kegiatan Adaptasi Perubahan Iklim yaitu upaya menyesuaikan berbagai kegiatan terhadap terjadinya perubahan iklim. Upaya ini bertujuan untuk meminimalisasi dampak yang telah terjadi, mengantisipasi resiko, sekaligus mengurangi biaya yang harus dikeluarkan akibat perubahan iklim.

Fokus kegiatan dalam adaptasi perubahan iklim antara lain adalah:

1. Meningkatkan adaptive capacity dari stakeholder yang terpapar dampak perubahan iklim.
  - Perusahaan dapat melakukan penilaian kerentanan (vulnerability assesment) melalui bantuan biaya studi dan riset kepada masyarakat atau pemda setempat dalam melakukan penilaian kerentanan terhadap perubahan iklim.
  - Perusahaan dapat melakukan upaya penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat terkait dengan upaya adaptasi perubahan iklim.
2. Mengurangi severity (keseriusan) dan probability (peluang) dampak yang terjadi.
  - Perusahaan dapat membantu pemerintah daerah dalam pembuatan tanggul pencegah masuknya air laut kedaratan, atau dengan penanaman pohon mangrove disepanjang pesisir pantai sebagai tanggul alami.
  - Perusahaan dapat membantu pemerintah dan masyarakat dalam pengadaan dan pembinaan penanganan banjir dan rob. Instalasi atau perbaikan drainase jalan termasuk pengadaan pompa untuk memompa air laut yang menggenangi jalan.
  - Perusahaan dapat melakukan riset tentang tata kota yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam beradaptasi terhadap kenaikan permukaan air laut.
  - Perusahaan dapat membantu masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk membuat bak/kolam untuk menampung hujan dan membuat sumur resapan.
  - Indikator penerapan upaya adaptasi perubahan iklim sebagai kegiatan CSR perusahaan.
  - Tersedianya data mengenai analisa dampak perubahan iklim dan upaya adaptasi yang dibutuhkan.
  - Rencana upaya adaptasi perubahan iklim yang disepakati oleh pemangku kepentingan terkait.
  - Pencatatan pelaksanaan dan hasil pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim yang dapat disosialisasikan kepada para pemangku kepentingan.

## 7. PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP

Pendidikan lingkungan hidup adalah upaya mengubah perilaku dan sikap yang dilakukan oleh berbagai pihak atau elemen masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai lingkungan dan isu permasalahan lingkungan yang pada akhirnya dapat menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelestarian dan keselamatan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Dengan demikian, Pendidikan Lingkungan Hidup merupakan kunci dari segala upaya membangun kesadaran dan kepedulian tentang arti penting dari pelestarian lingkungan hidup.

Sedangkan tujuan Pendidikan Lingkungan Hidup antara lain mendorong dan memberikan kesempatan kepada masyarakat memperoleh pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang pada

akhirnya dapat menumbuhkan kepedulian, komitmen untuk melindungi, memperbaiki serta memanfaatkan lingkungan hidup secara bijaksana, turut menciptakan pola perilaku baru yang bersahabat dengan lingkungan hidup, mengembangkan etika lingkungan hidup dan untuk memperbaiki kualitas hidup. Sebagaimana tujuan tersebut, maka kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup disusun untuk menciptakan iklim yang mendorong semua pihak agar berperan dalam pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup untuk pelestarian lingkungan hidup.

Memperhatikan konsep dan tujuan Pendidikan Lingkungan Hidup maka membangun kesadaran merupakan tahapan penting dari sebuah proses partisipasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam berbagai kegiatan pelestarian lingkungan hidup. Lebih dari sekedar diseminasi pengetahuan dan keterampilan, Pendidikan Lingkungan Hidup juga berfungsi sebagai media penting untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma baru dalam hal interaksi antara manusia dan lingkungan. Oleh karenanya proses pendidikan yang menekankan metode dialogis akan lebih mampu mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan berkelanjutan serta menghindarkan konflik yang bersifat destruktif.

Keberhasilan pendidikan lingkungan hidup ini secara obyektif dapat dinilai berdasarkan indikator besarnya tingkat perubahan perilaku sasaran terkait di ketiga ranah, yaitu : kesadaran (kognitif), sikap (afektif) dan tindakan (psikomotorik/aksi). Perubahan yang dimaksud sepatutnya dapat berkontribusi pada tingkat keterlibatan individu/kelompok/komunitas sasaran yang bersangkutan dalam proses kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki ataupun memelihara kualitas lingkungan hidup. Perubahan yang dimaksud sepatutnya dapat berkontribusi pada tingkat keterlibatan individu/kelompok/komunitas sasaran dalam proses kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki ataupun memelihara kualitas lingkungan hidup.

Kegiatan pendidikan tidak dapat dilakukan secara singkat, tetapi harus berkelanjutan dan holistik. Selain itu perspektif jangka panjang dari para penggiat kegiatan CSR perlu lebih diutamakan daripada kepentingan jangka pendek.

### **3.1.3. CSR BIDANG CIPTA KARYA**

Pembangunan di bidang Cipta Karya merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbaikan serta peningkatan kualitas permukiman dan lingkungan. Bidang ini mencakup beberapa ruang lingkup sektoral yang membuka peluang kerja sama CSR antara perusahaan dengan Ditjen Cipta Karya, yaitu Pengembangan Air Minum, Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Penataan Bangunan dan Lingkungan serta Pengembangan Permukiman.

Namun, peluang yang ada hanya dapat dimanfaatkan dengan baik jika didukung oleh semua pihak terkait serta kesiapan dan komitmen perusahaan selaku pelaksana CSR dalam mengembangkan program-program di bidang Cipta Karya. Bidang Kegiatan yang Bisa Dikerjasamakan

#### **A. SEKTOR PENGEMBANGAN AIR MINUM (PAM)**

Pada sistem penyediaan air minum, kegiatan yang ditawarkan untuk kerja sama CSR adalah sebagai berikut:

##### **1. Air Baku**

a. Kegiatan untuk mendapatkan air baku sesuai dengan jenis sumbernya adalah:

- Pembangunan broncaptering/bangunan penangkap
- mata air
- Pembangunan intake (sumber air permukaan)
- Pembangunan sumur bor (sumber air tanah)

b. Pembangunan bak penampung/reservoir air baku

c. Pengadaan dan pemasangan pipa transmisi air baku

2. Pengolahan Air Minum
  - a. Pembangunan instalasi pengolahan air minum
  - b. Pembangunan reservoir air minum
3. Transmisi Air Minum
  - a. Pengadaan dan pemasangan pompa transmisi air minum
  - b. Pengadaan dan pemasangan pipa transmisi air minum
  - c. Pembangunan bak pelepas tekan
4. Distribusi Air Minum
  - a. Pembangunan reservoir distribusi
  - b. Pengadaan dan pemasangan pompa distribusi
  - c. Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa distribusi
  - d. Pengadaan dan pemasangan sambungan rumah
  - e. Pengadaan dan pemasangan hidran umum

## **B. SEKTOR PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN**

### **1. Pemukiman (PPLP)**

Sektor PPLP terdiri dari 3 (tiga) subsektor yaitu Persampahan, Air Limbah, dan Drainase, dimana kegiatan yang dapat ditawarkan untuk ketiga subsektor tersebut adalah:

1. Subsektor persampahan
  - a. Komponen Pengumpulan dan Pengangkutan ke Tempat Penampungan Sementara (TPS)
    - Pengadaan tempat sampah-sampah seperti bin dan tong sampah
    - Pengadaan gerobak sampah, becak motor sampah, mini truck untuk pengumpulan dan pengangkutan.
    - Pembangunan TPS
  - b. Komponen Pengangkutan ke Tempat Pemrosesan Akhir
    - Pengadaan loader
    - Pengadaan dump truck, arm roll truck, trailer truck, dan compactor truck
  - c. Komponen Pengolahan
    - Pembangunan tempat pemrosesan akhir
    - Pembangunan instalasi pengomposan
    - Pengadaan mesin pemilah sampah dan daur ulang
2. Subsektor air limbah

Pengolahan air limbah dibagi menjadi 2 (dua) sistem, yaitu sistem off site (pengolahan terpusat) dan sistem on site (pengolahan setempat)

- a. Kegiatan pengolahan sistem off site:
  - Pembangunan instalasi pengolahan air limbah (skala kota/komunal)
  - Pengadaan dan pemasangan pipa/saluran air limbah (skala kota/komunal)
  - Pengadaan dan pemasangan sambungan rumah (skala kota/komunal)
- b. Kegiatan pengolahan sistem on site:
  - Pembangunan MCK

- Pembangunan tangki septik komunal
- Pembangunan Instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT)
- Pengadaan truk tinja

### 3. Subsektor drainase

Kegiatan pembangunan prasarana dan sarana drainase terdiri dari bangunan-bangunan sebagai berikut:

#### a. Pembangunan prasarana dan sarana drainase baru:

- Saluran terbuka dan tertutup
- Bangunan persilangan: gorong-gorong, dan siphon
- Bangunan terjun
- Tanggul
- Bangunan penangkap pasir
- Pintu air
- Kolam retensi
- Pompa dan rumah pompa
- Trash Rack
- Sumur resapan dan kolam resapan

#### b. Rehabilitasi/normalisasi/peningkatan jaringan drainase yang ada

## C. SEKTOR PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

Kegiatan yang dapat dikerjasamakan antara lain:

1. Penyediaan prasarana dan sarana untuk Ruang Terbuka Hijau
2. Revitalisasi kawasan sejarah/tradisional
3. Pembangunan sarana dan prasarana pemukiman tradisional

## D. SEKTOR PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

Kegiatan yang dapat dikerjasamakan antara lain:

1. Penataan kawasan perkotaan:
  - Pembangunan prasarana dan sarana peningkatan lingkungan permukiman kumuh
  - Pembangunan prasarana dan sarana peningkatan lingkungan permukiman baru
2. Penataan kawasan perdesaan:
  - Pembangunan sarana dan prasarana kawasan perdesaan potensial

## 3.2. METODOLOGI PENYUSUNAN

Metodologi penyusunan Identifikasi SCR di Kabupaten Lamongan, sebagai berikut :

### 1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini dilakukan persiapan administrasi yang dibutuhkan di dalam melakukan identifikasi CSR yang ada di Kabupaten Lamongan. Kegiatan yang dilakukan dalam bentuk surat menyurat

## 2. Tahap Identifikasi

Pada tahap ini kegiatan dilakukan yang meliputi :

- Identifikasi potensi dan permasalahan Kabupaten Lamongan, berikut issue-issue strategis di Kabupaten Lamongan
- Identifikasi perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Lamongan baik yang sudah menerapkan CSR maupun yang belum melakukan CSR.
- Identifikasi program-program CSR yang sudah diterapkan di Kabupaten Lamongan berikut lokasi dan kegiatan yang sudah dilakukan
- Mengundang para pengusaha untuk memberikan informasi terkait tanggungjawab sosial yang telah dilakukan, maupun yang akan dilakukan terhadap Pemerintah Kabupaten Lamongan

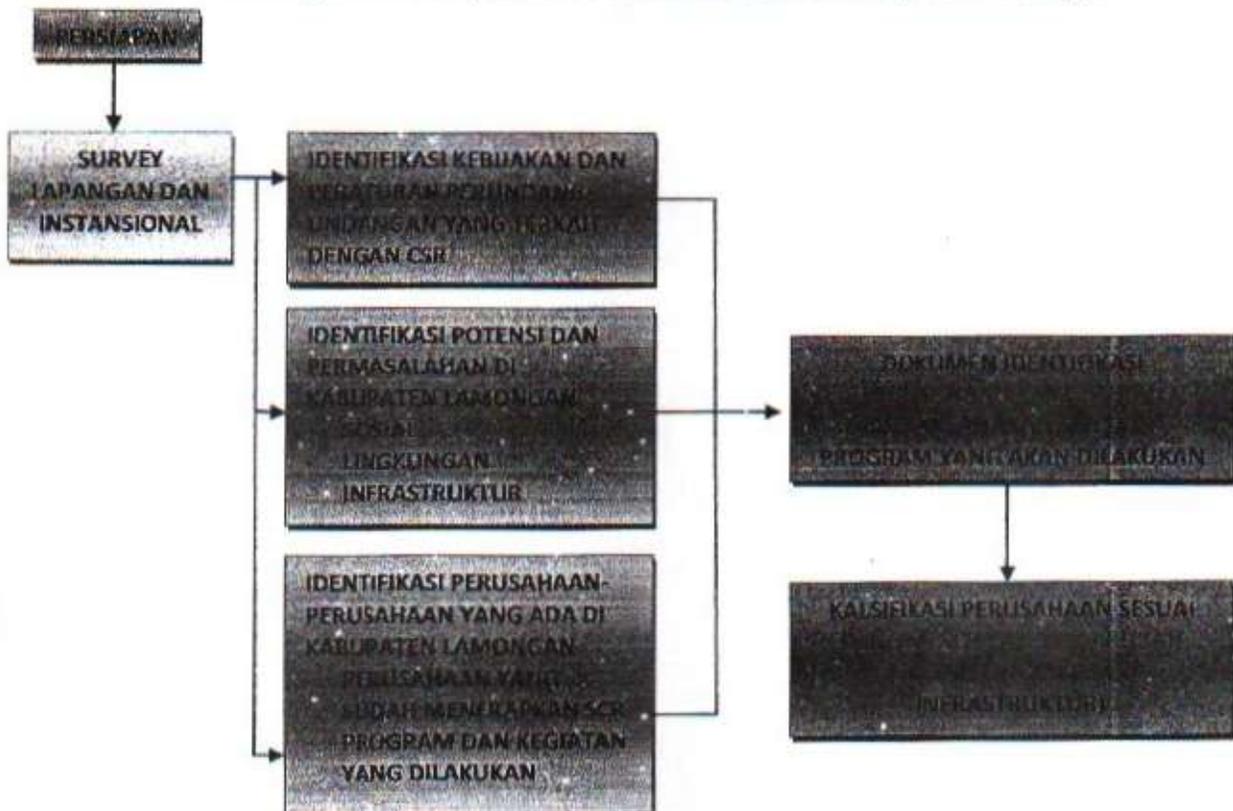
Kegiatan ini dapat dilakukan dengan melakukan survey data sekunder terhadap instansi, dinas terkait termasuk perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Lamongan maupun survey lapangan dengan menyebarkan kuestioner yang dibagikan pada perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Lamongan

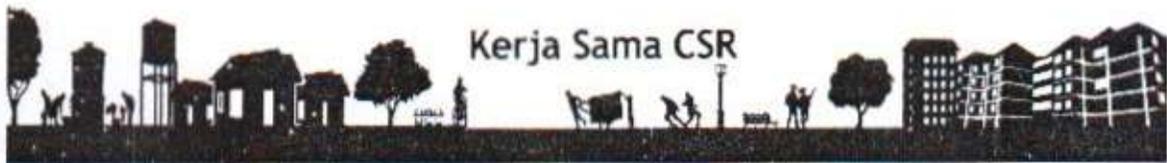
## 3. Tahap Kompilasi dan Tabulasi

Data-data yang didapat dari hasil survey lapangan maupun sekunder, selanjutnya ditabulasi dalam bentuk tabel, peta dan uraian yang seluruhnya dikompilasi menjadi satu laporan yang memuat gambaran umum Kabupaten Lamongan termasuk potensi dan permasalahan serta issue-issue strategis yang mengemuka, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Lamongan, perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan CSR serta program-program dan kegiatan tanggungjawab sosial yang sudah dilakukan di Kabupaten Lamongan

Untuk lebih jelasnya kerangka pikir penyusunan Identifikasi CSR di Kabupaten Lamongan sebagaimana Bagan Berikut ini :

**Bagan 3.1.**  
**Kerangka Pikir Penyusunan Identifikasi CSR di Kabupaten Lamongan**





## **bab-4**

# **RENCANA KERJA DAN JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN**

### **4.1 RENCANA KERJA**

#### **1. Tahap Persiapan**

Pada tahap ini dilakukan persiapan administrasi yang dibutuhkan di dalam melakukan identifikasi CSR yang ada di Kabupaten Lamongan. Kegiatan yang dilakukan dalam bentuk surat menyurat dan membutuhkan waktu kurang lebih 1 minggu

#### **2. Tahap Identifikasi**

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan meliputi :

- Identifikasi potensi dan permasalahan Kabupaten Lamongan, berikut issue-issue strategis di Kabupaten Lamongan
- Identifikasi perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Lamongan baik yang sudah menerapkan CSR maupun yang belum melakukan CSR.
- Identifikasi program-program CSR yang sudah diterapkan di Kabupaten Lamongan berikut lokasi dan kegiatan yang sudah dilakukan
- Mengundang para pengusaha untuk memberikan informasi terkait tanggungjawab sosial yang telah dilakukan, maupun yang akan dilakukan terhadap Pemerintah Kabupaten Lamongan

Kegiatan ini dapat dilakukan dengan melakukan survey data sekunder terhadap instansi, dinas terkait termasuk perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Lamongan maupun survey lapangan dengan menyebarkan kuesioner yang dibagikan pada perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Lamongan. Kegiatan ini dilakukan kurang lebih selama 2 (dua) Bulan

#### **3. Tahap Kompilasi dan Tabulasi**

Data-data yang didapat dari hasil survey lapangan maupun sekunder, selanjutnya ditabulasi dalam bentuk tabel, peta dan uraian yang seluruhnya dikompilasi menjadi satu laporan yang memuat gambaran umum Kabupaten Lamongan termasuk potensi dan permasalahan serta issue-issue strategis yang mengemuka, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Lamongan, perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan CSR serta program-program dan kegiatan tanggungjawab sosial yang sudah dilakukan di Kabupaten Lamongan.

Secara paralel kegiatan ini dilakukan bersamaan dengan data yang di dapat dari lapangan baik berupa data primer maupun data sekunder. Waktu yang dibutuhkan kurang lebih 2 (dua) bulan.

### **4.2 JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN**

Kegiatan Penyusunan Dokumen Identifikasi CSR sesuai dengan TOR adalah 4 (empat) bulan terhitung sejak dikeluarkannya SPMK. Masing-masing tahapan kegiatan yang akan dilakukan dalam Identifikasi CSR di Kabupaten Lamongan, sebagaimana terlihat pada Tabel 4.1.

**Tabel 4.1.**  
**JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN**  
**IDENTIFIKASI CSR DI KABUPATEN LAMONGAN**

No	Kegiatan	Bulan															
		Bulan-1				Bulan-2				Bulan-3				Bulan-4			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan	■															
2	Survey Lapangan dan Instansional	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3	Laporan Pendahuluan																
	- Diskusi		■	■	■												
	- Penyerahan Laporan Final			■	■												
4	Kompilasi dan Tabulasi Data							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5	Laporan Antara																
	- Diskusi													■	■	■	■
	- Penyerahan Laporan Final													■	■	■	■
6	Laporan Akhir																
	- Diskusi															■	■
	- Penyerahan Laporan Final																■

### 4.3 KOMPOSISI TIM DAN PENUGASAN

Di dalam pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Identifikasi CSR, konsultan membentuk team pelaksana pekerjaan yang terdiri dari tenaga-tenaga ahli yang professional, berpengalaman sesuai dengan bidangnya dengan dibantu oleh tenaga-tenaga yang professional. Struktur organisasi yang dibentuk, dilakukan dengan tujuan agar pekerjaan yang dilaksanakan oleh konsultan dapat dilaksanakan dengan baik, tepat waktu dan sesuai dengan harapan pemberi pekerjaan

Sikap profesional konsultan ditunjukkan tidak hanya pada kemampuan individu personil dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, tetapi juga kemampuan dalam mensinkronkan tugas dan tanggungjawabnya dengan tugas dan tanggungjawab personil lainnya dalam tim. Selain kemampuan individu dan tim, kemampuan seorang Team Leader mengkoordinasi, mengendalikan, mengelola dan menguasai terhadap lingkup pekerjaan dan mengenali seluruh permasalahan pekerjaan yang ada di satuan wilayah kerjanya serta mampu mendistribusikan/mendelegasikan tugas dan peran dengan baik kepada staf yang dipimpinnya adalah suatu hal yang diperlukan dalam melaksanakan proyek. Secara lebih rinci, Tim yang akan dibentuk oleh konsultan untuk Penyusunan Identifikasi CSR di Kabupaten Lamongan, sebagai berikut :

#### Tenaga Ahli :

1. **Ketua tim (team leader)** disyaratkan minimal S1 Planologi, lulusan universitas/ perguruan tinggi negeri atau yang telah disamakan, berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan penyusunan Identifikasi CSR sekurang-kurangnya 4 tahun, mempunyai sertifikat keahlian (SKA). Dengan jumlah orang bulan : 4.
2. **Tenaga Ahli Ekonomi**, disyaratkan minimal S1 Ekonomi Pembangunan, lulusan universitas/ perguruan tinggi negeri atau yang telah disamakan, berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan penyusunan Identifikasi CSR sekurang-kurangnya 4 tahun, dengan jumlah orang bulan : 2

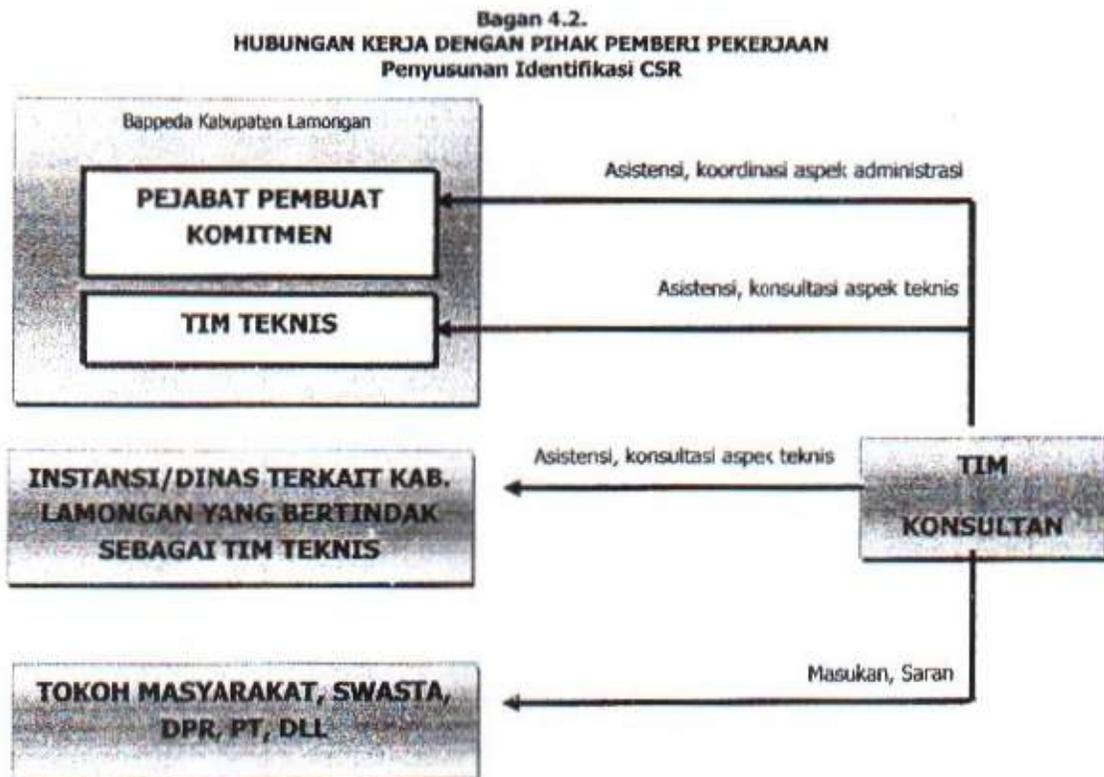
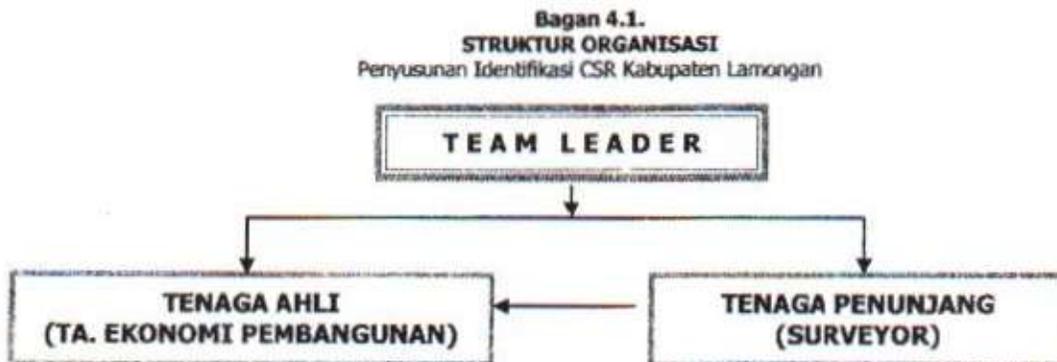
**Tenaga Penunjang :**

1. Tenaga Surveyor sebanyak 2 (dua) orang dengan jumlah orang bulan : 1 bulan

Dalam struktur organisasinya, konsultan akan membagi ke dalam 2 (dua) jenis hubungan yaitu:

1. Hubungan Struktural/Komando. Hubungan komando/struktural terjadi antara Team leader dengan tenaga ahli, maupun hubungan koordinasi Internal.
2. Hubungan Koordinasi Eksternal. Hubungan ini terjadi antara Tim Konsultan dengan Pihak Pemberi Pekerjaan.

Secara rinci struktur organisasi Penyusunan Identifikasi CSR Kabupaten Lamongan, dapat dilihat pada Bagan 4.1 dan Bagan 4.2..



#### 4.4 JADWAL PENUGASAN TENAGA AHLI

Sesuai dengan aturan yang tercantum dalam TOR, maka dalam menangani pekerjaan Penyusunan Dokumen Identifikasi CSR Kabupaten Lamongan, jadwal tenaga ahli sebagai team perencana sebagai berikut :

Tabel 4.2.  
Jadwal Penugasan Tenaga Ahli  
Penyusunan Identifikasi CSR Kabupaten Lamongan

No	Tenaga Ahli	Bulan			
		1	2	3	4
1	Team Leader				
2	Ahli Ekonomi				
3	Surveyor-1				
4	Surveyor-2				